CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan SKPD merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa setiap entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan secara periodik wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan, guna membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan

menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;

b. Menyediaakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas

pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

b. Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

c. Laporan Operasional (LO)

LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.

d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO dan LPE. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian wajar laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset daerah Provinsi Jawa Tengah, meliputi :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

m. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

n. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

o. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

p. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021;

q. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Tanggal 11 November 2021 Nomor : 903/00155873 perihal Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 serta Transaksi Non Tunai.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab 2 Ekonomi Makro

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Bab 4 Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD

Bab 5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Penjelasan Pos - Pos Neraca

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab 6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab 7 Penutup

Lampiran

BAB 2

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2021 lebih baik dibandingkan dengan 2020. Hal ini seiring dengan perluasan implementasi vaksin, menurunnya kasus Covid-19, dan meningkatnya permintaan global serta domestik. Kinerja positif ekspor dan investasi diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah lebih lanjut. Membaiknya perekonomian negara tujuan ekspor Jawa Tengah seperti AS,Tiongkok, dan Eropa, berdampak positif terhadap industri di Jawa Tengah. Kinerja investasi juga meningkat yang ditopang oleh investasi pemerintah dan swasta. Peran stimulus fiskal dan meningkatnya penyerapan anggaran berkontribusi positif dalam menyangga pemulihan ekonomi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah merilis data pada bulan Desember 2021, Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 0,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,3. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilacap sebesar 0,82 persen dengan IHK sebesar 106,21 diikuti oleh Kota Purwokerto sebesar 0,74 persen dengan IHK sebesar 107,15; Kota Surakarta sebesar 0,71 persen dengan IHK sebesar 107,31; Kota Tegal sebesar 0,66 persen dengan IHK sebesar 107,89; Kota Semarang sebesar 0,60 persen dengan IHK sebesar 107,49; dan inflasi terendah terjadi di Kota Kudus sebesar 0,50 persen dengan IHK sebesar 106,32.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,08 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,53 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,32 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,21 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,20 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14 persen; kelompok transportasi sebesar 0,12 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar -0,08 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,06 persen. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil).

Penyebab utama inflasi di Jawa Tengah Desember 2021 adalah kenaikan harga cabai rawit, telur ayam ras, cabai merah, daging ayam ras, dan minyak goreng. Penahan utama inflasi di Jawa Tengah adalah penurunan harga pepaya, biaya administrasi transfer uang, emas perhiasan, salak, dan

nangka muda. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 1,70 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,70 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah tahun 2021 sebesar 72,16 tumbuh 0,40 persen (meningkat 0,29 poin) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan IPM Jawa Tengah tahun 2021 didukung oleh peningkatan semua komponen penyusunnya. Pada 2020 pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,95 persen dibanding tahun 2020. Dari sisi pendidikan, anak-anak di Jawa Tengah yang berusia 7 tahun pada tahun 2021, memiliki harapan menikmati pendidikan selama 12,77, Angka ini meningkat 0,07 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,70 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06 tahun, menjadi 7,75 tahun pada tahun 2021. Dari sisi kesehatan, bayi di Jawa Tengah yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan dapat hidup hingga 74,47 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Tengah Desember 2021 sebesar 103,18 atau naik 1,82 persen dibanding NTP bulan sebelumnya sebesar 101,34. Kenaikan NTP disebabkan Kenaikan Indeks Harga yang Diterima petani (It) sebesar 2,61 persen lebih cepat dibanding kenaikan Indeks Harga yang Dibayar petani (Ib) sebesar 0,78 persen. Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Jawa Tengah Desember 2021 tercatat sebesar 102,76 atau naik sebesar 2,49 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya sebesar 100,26.

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 lebih baik dibanding 2020, meski lebih rendah dibandingkan proyeksi awal sebelum terjadinya gelombang kedua pandemi Covid-19. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter Bank Indonesia. Daya beli konsumen terjaga ditopang oleh bantuan sosial dan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2021. Perbaikan perekonomian global yang diperkirakan berlanjut pada Negara tujuan ekspor Jawa Tengah, mendorong perbaikan ekspor. Optimisme peningkatan ekspor tersebut sejalan dengan karakteristik komoditas ekspor Jawa Tengah yang memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sandang, furnitur, hingga makanan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan

masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah terbagi dalam kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 ditempuh melalui arah kebijakan sebagai berikut.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Struktur Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber pendapatan yang memungkinkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid 19 serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan *stakeholders* terkait. Untuk itu, guna mencapai target pendapatan daerah Tahun Anggaran2021 akan ditempuh melalui upaya :

1. Optimalisasi pungutan PAD melalui intensifikasi melalui penyempurnaan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah, ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru, kerjasama dengan *stakeholder* dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, peningkatan layanan pembayaran pajak dengan kemudahan berbasis teknologi informasi serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
2. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal terkait dalam rangka optimaliasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;

3. Inventarisasi, optimalisasi, dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (kemiskinan, pengangguran dan pangan);
4. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Struktur Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari :

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, effisiensi, akutabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol covid 19 dalam pelaksanaan *New Nomal*;
   c. Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;
   d. Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi tahun 2021 diarahkan untuk subsidi bunga bagi koperasi dan UKM serta subsidi kredit bagi petani sebagai upaya mempercepat pemulihan ekonomi karena dampak Covid 19;
   e. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikn, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.

3. Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi: bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak.

4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun 2021 dirinci atas jenis:

   a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;

   b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2021 dan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19), maka belanja daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 diarahkan pada :

1. Pemulihan dan perkuatan perekonomian utamanya pada sector terdampak (Industri, Pariswisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM) serta pemulihan kembali daya beli masyarakat;

2. Penanganan masalah sosial, kemisikinan dan pengangguran yang diantaranya sebagai dampak dari pandemik Covid-19 termasuk pada kelompok miskin baru;

3. Peningkatan kualitas SDM pada aspek pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja;

4. Kesiapsiagaan terhadap bencana dengan peningkatan kapasitas dan adaptasi terhadap *New Normal* utamanya pada aspek kesehatan masyarakat, transportasi, pariwisata, pendidikan, perdagangan, logistik dan pengelolaan bencana;
5. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan/strategis RPJMD 2018-2023 serta dukungan terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang;
6. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan. Sedangkan *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran /aspirasi Legislatif, masulan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
8. Meningkatkan keserasian dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan Tahun 2021 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2021 dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Jawa Tengah juga diarahkan untuk memperkuat kondisi fiskal dan alternatif pembiayaan infrastruktur daerah melalui *creative financing*.

2.2.4. Kebijakan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Anggaran pendapatan dan belanja yang dikelola oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA 2021. Sebagai fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan, jumlah anggaran yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk pendapatan sebesar Rp 172.112.520,00 dengan realisasi sebesar Rp 88.727.499.435 dan anggaran belanja sebesar Rp. 43.341.801.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 41.288.392.116,00.

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari retribusi daerah, lain-lain PAD yang sahn, jasa giro dan pendapatan bunga. Sedangkan dari sisi belanja terdiri dari tiga program kegiatan yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah, program pengelolaan keuangan daerah, program pengelolaan barang milik daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikelola oleh BPKAD Provinsi Jawa Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut :

PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih Kurang
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**172.112.520.000**	**88.727.499.435**	**83.385.020.565**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**172.112.520.000**	**88.727.499.435**	**83.385.020.565**
4.1.2	**Retribusi Daerah**	**6.547.020.000**	**1.903.488.640**	**4.643.531.360**
4.1.2.2	Retribusi Jasa Usaha	6.547.020.000	1.903.488.640	4.643.531.360
4.1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.530.645.000	1.903.488.640	-372.843.640
4.1.2.2.6	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	5.016.375.000	0	5.016.375.000
4.1.4	**Lain-lain PAD yang Sah**	**165.565.500.000**	**86.824.010.795**	**78.741.489.205**
4.1.4.1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	565.500.000	914.674.250	-349.174.250
4.1.4.1.2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	415.500.000	130.149.400	285.350.600
4.1.4.1.5	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	150.000.000	651.644.250	-501.644.250
4.1.4.1.6	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0	132.880.600	-132.880.600
4.1.4.5	**Jasa Giro**	**40.000.000.000**	**33.421.665.370**	**6.578.334.630**
4.1.4.5.1	Jasa Giro pada Kas Daerah	40.000.000.000	33.421.665.370	6.578.334.630
4.1.4.7	**Pendapatan Bunga**	**125.000.000.000**	**52.487.671.175**	**72.512.328.825**
4.1.4.7.1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	125.000.000.000	52.487.671.175	72.512.328.825
	Jumlah Pendapatan	**172.112.520.000**	**88.727.499.435**	**83.385.020.565**

BELANJA DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu Anggaran (Rp)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**29.339.334.000**	**27.553.368.994**	**1.785.965.006**
01.1.01	**Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**91.325.000**	**86.397.500**	**4.927.500**
01.1.01.01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	16.800.000	16.800.000	0
01.1.01.02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	28.331.000	23.996.500	4.334.500
01.1.01.03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	15.214.000	15.204.000	10.000
01.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	10.840.000	10.340.500	499.500
01.1.01.05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.140.000	20.056.500	83.500
01.1.02	**Administrasi Keuangan**	**23.094.506.000**	**21.532.916.330**	**1.561.589.670**
01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.133.606.000	17.801.536.467	1.332.069.533
01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.870.900.000	3.643.957.393	226.942.607
01.1.02.04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	30.000.000	29.086.450	913.550
01.1.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	10.000.000	9.769.020	230.980
01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	15.000.000	14.875.500	124.500
01.1.02.09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	35.000.000	33.691.500	1.308.500
01.1.03	**Administrasi Umum**	**6.133.503.000**	**5.931.655.164**	**201.847.836**
01.1.03.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.900.000	19.187.500	712.500
01.1.03.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.202.560.000	1.154.409.142	48.150.858
01.1.03.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	100.000.000	99.957.780	42.220
01.1.03.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1.327.997.000	1.277.146.498	50.850.502
01.1.03.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	616.701.000	602.844.500	13.856.500
01.1.03.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.600.000	61.493.100	106.900
01.1.03.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	84.997.000	78.156.100	6.840.900
01.1.03.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.500.000	4.580.000	920.000
01.1.03.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	346.570.000	346.087.192	482.808
01.1.03.18	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	676.894.000	674.869.875	2.024.125
01.1.03.23	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	240.000.000	229.148.000	10.852.000
01.1.03.25	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	390.800.000	347.045.000	43.755.000
01.1.03.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	175.000.000	163.314.057	11.685.943
01.1.03.31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	420.711.000	415.509.972	5.201.028
01.1.03.33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	102.500.000	101.681.250	818.750
01.1.03.35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	361.223.000	355.697.198	5.525.802
01.1.03.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	550.000	528.000	22.000
01.1.04	**Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**20.000.000**	**2.400.000**	**17.600.000**
01.1.04.09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	20.000.000	2.400.000	17.600.000
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**10.455.330.000**	**10.209.584.005**	**245.745.995**
02.1.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**5.711.188.000**	**5.623.740.200**	**87.447.800**

02.1.01.01		Penyusunan KUA dan PPAS	100.000.000	98.927.300	1.072.700
02.1.01.02		Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	70.000.000	67.247.500	2.752.500
02.1.01.04		Penyusunan dan Review DPA SKPD / Perubahan DPA SKPD	71.400.000	63.400.000	8.000.000
02.1.01.05		Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	2.181.058.000	2.156.100.500	24.957.500
02.1.01.06		Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD	2.272.960.000	2.254.889.000	18.071.000
02.1.01.07		Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPD	279.912.000	250.548.000	29.364.000
02.1.01.08		Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran	250.400.000	249.200.000	1.200.000
02.1.01.10		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	479.054.000	477.597.900	1.456.100
02.1.01.11		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	6.404.000	5.830.000	574.000
02.1.02	**Pembinaan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten/Kota**		**450.626.000**	**440.324.866**	**10.301.134**
02.1.02.02		Evaluasi APBD Kabupaten/Kota	122.059.000	118.029.800	4.029.200
02.1.02.03		Evaluasi Perubahan APBD Kabupaten/Kota	110.431.000	109.932.000	499.000
02.1.02.04		Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	99.181.000	98.385.600	795.400
02.1.02.05		Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	118.955.000	113.977.466	4.977.534
02.1.04	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**		**3.120.643.000**	**3.050.967.600**	**69.675.400**
02.1.04.03		Koordinasi dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi	319.544.000	317.819.250	1.724.750
02.1.04.04		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota	894.400.000	894.400.000	0
02.1.04.05		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA	76.241.000	75.196.700	1.044.300
02.1.04.06		Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	45.060.000	44.895.500	164.500
02.1.04.07		Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan	251.486.000	250.388.500	1.097.500
02.1.04.08		Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	171.954.000	160.527.500	11.426.500
02.1.04.09		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	348.562.000	331.006.750	17.555.250
02.1.04.10		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	698.184.000	673.989.000	24.195.000
02.1.04.12		Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	315.212.000	302.744.400	12.467.600
02.1.03	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**		**1.172.873.000**	**1.094.551.339**	**78.321.661**
02.1.03.01		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	543.521.000	536.297.000	7.224.000
02.1.03.02		Penatausahaan Pembiayaan Daerah	267.830.000	239.020.459	28.809.541
02.1.03.05		Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP	253.276.000	234.814.880	18.461.120
02.1.03.06		Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	16.246.000	16.246.000	0

02.1.03.09		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)	92.000.000	68.173.000	23.827.000
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**		**3.547.137.000**	**3.525.439.117**	**21.697.883**
03.1.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**		**3.547.137.000**	**3.525.439.117**	**21.697.883**
03.1.01.03		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	419.695.000	419.253.750	441.250
03.1.01.04		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah	149.753.000	147.932.350	1.820.650
03.1.01.05		Penatausahaan Barang Milik Daerah	348.491.000	345.541.000	2.950.000
03.1.01.06		Inventarisasi Barang Milik Daerah	156.175.000	156.115.000	60.000
03.1.01.07		Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	1.590.084.000	1.581.231.617	8.852.383
03.1.01.09		Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	181.589.000	181.535.000	54.000
03.1.01.10		Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	399.365.000	391.913.400	7.451.600
03.1.01.11		Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	137.130.000	137.130.000	0
03.1.01.12		Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari SKPD	164.855.000	164.787.000	68.000
		Jumlah	**43.341.801.000**	**41.288.392.116**	**2.053.408.884**

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.1.1. Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2021 sejumlah Rp 172.112.520.000,00 terealisasi sejumlah Rp 88.727.499.435,00 atau 51,55%. Pendapatan asli daerah tersebut merupakan bagian dari kontribusi hasil retribusi jasa usaha sebesar Rp 1.903.488.640,00 atau 29,07% dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 86.824.010.795,00 atau 52,44%. Proporsi pendapatan asli daerah tahun anggaaran 2021 dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut :

GAMBAR 3.1
PROPORSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

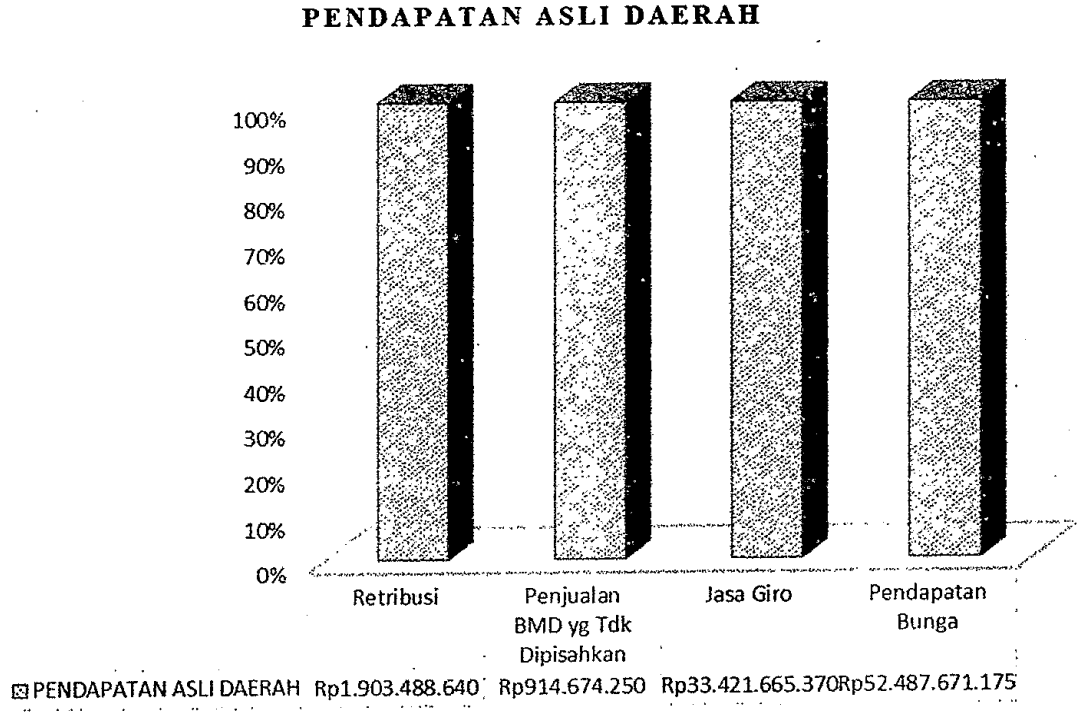

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD TA 2021

Retribusi Jasa usaha bersumber dari retribusi penyewaan tanah & bangunan sebesar Rp 1.903..488.640,00. Sedangkan lain-lain PAD yang sah berasal dari hasil penjualan BMD yang tidak tidak dipisahkan sebesar Rp 914.674.250,00, hasil penjualan peralatan dan mesin sebesar Rp-

130.149.400,00, hasil penjualan aset tetap lainnya sebesar Rp 651.644.250,00 dan dan hasil penjualan aset lainnya sebesar Rp 132.880.600,00.

Realisasi pendapatan retribusi daerah tahun anggaran 2021 sebesar Rp 1.903..488.640,00. mengalami penurunan sebesar Rp 612.084.638 jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 2.515.573.278,00. Sedangkan realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 86.824.010.795,00 mengalami penurunan sebesar Rp 33.076.908.247,00 jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 119.900.919.042,00

Perbandingan realisasi retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah tahun anggaran 2021 dan tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada gambar 3.2 sebagai berikut :

GAMBAR 3.2
PERBANDINGAN PAD TA 2021 & TA 2020

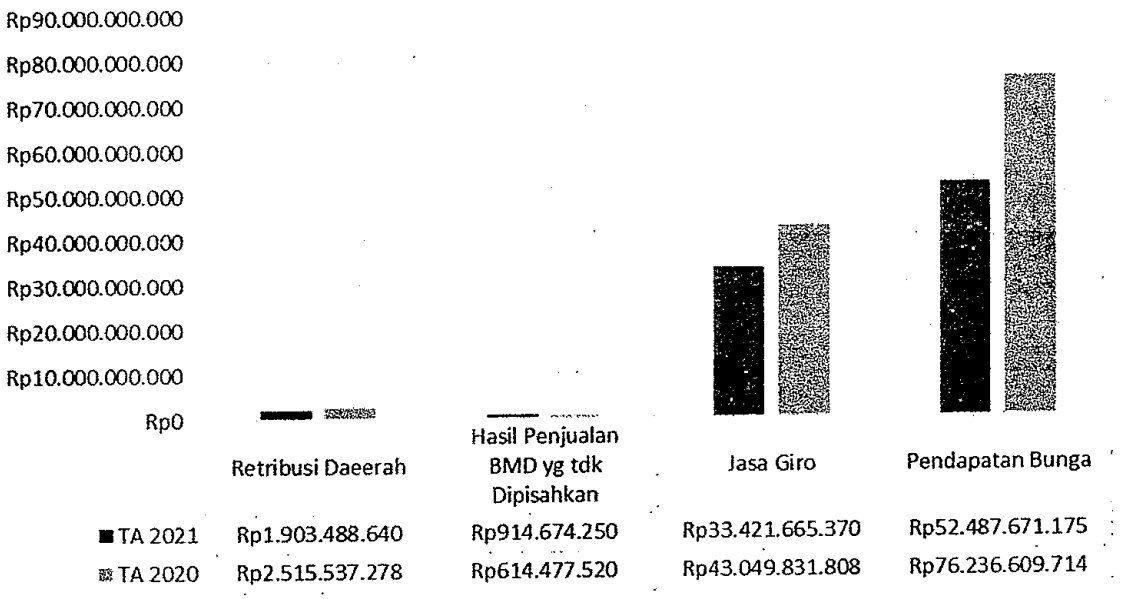

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD TA 2021 & TA 2020

3.1.2. Belanja Daerah

Target anggaran belanja daerah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp 43.341.801.000,00 realisasinya sebesar Rp 41.288.392.116,00 atau mencapai 95,26% dari total anggaran belanja. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah belanja operasi sebesar Rp 40.506.080.059,00 atau 98,11% dari total belanja daerah, sedangkan belanja modal sebesar

Rp 782.312.057,00 atau 1,89% dari total belanja daerah. Proporsi belanja daerah tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada gambar 3.3 dibawah ini :

GAMBAR 3.3
PROPORSI BELANJA DAERAH TA 2021

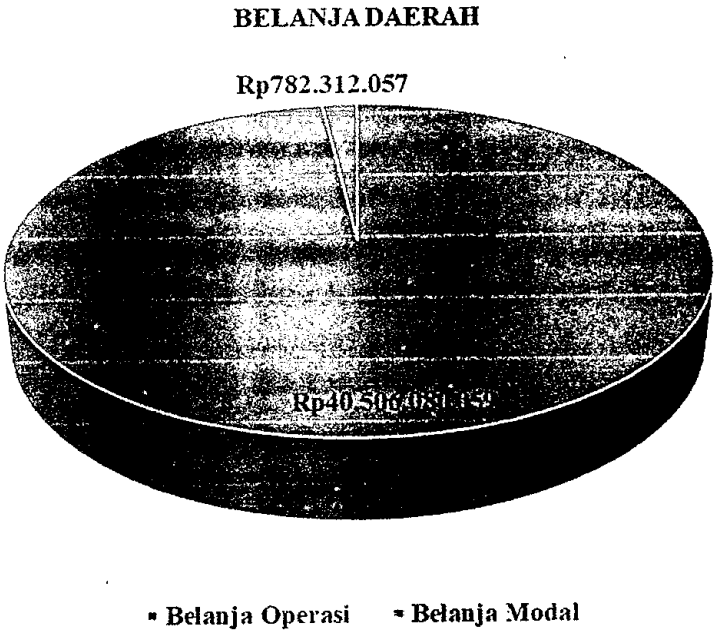

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD TA 2021

Proporsi belanja operasi tahun anggaran 2021 terdiri dari belanja pegawai Rp 17.801.536.467,00 atau 95,31% dan belanja barang dan jasa Rp 22.704.543.592,00 atau 97,17%. Belanja pegawai terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 8.851.536.467,00 dan tambahan penghasilan ASN sebesar Rp 8.950.000.000,00.

Sedangkan belanja barang dan jasa terdiri dari belanja barang sebesar Rp 4.792.990.962,00 atau 97,41%, belanja jasa sebesar Rp 13.169.924.593,00 atau 96,98%, belanja pemeliharaan sebesar Rp 833.663.757,00 atau 98,71% dan belanja perjalanan dinas sebesar Rp3.907.964.280,00 atau sebesar 97,18% dari total anggaran yang telah ditetapkan. Proporsi belanja operasi tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada gambar 3.4 dibawah ini :

GAMBAR 3.4
PROPORSI BELANJA OPERASI TA 2021

BELANJA OPERASI

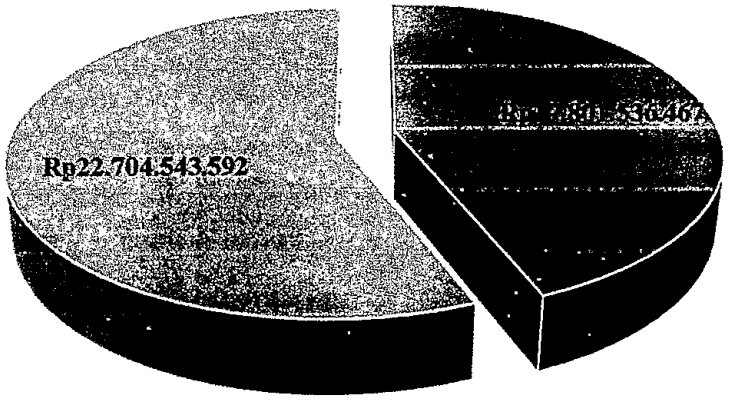

▪ Belanja Pegawai ▫ Belanja Barang & Jasa

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD TA 2021

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2021 sebesar 40.506.080.059,00 mengalami penurunan sebesar Rp 6.947.434.177 jika dibandingkan dengan realisasi belanja operasi di tahun anggaran 2020 sebesar Rp 47.453.514.236,00. Penurunan ini disebebkan karena adanya refocusing anggaran di tahun 2021 sehingga dilakukan efisiensi dalam belanja.

Pada komponen belanja modal tahun anggaran 2021, proporsi belanja modal terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 347.045.000,00 atau 88,8% dan belanja gedung dan bangunan sebesar Rp 435.267.057,00 atau 96,62%. Belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari belanja alat rumah tangga sebesar Rp 12.000.000,00 dan belanja peralatan komputer sebesar Rp 335.045.000,00. Sedangakan belanja Gedung dan bangunan terdiri dari belanja bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp 163.314.057,00 dan belanja tugu/tanda batas sebesar Rp 271.953.000,00.

Proporsi belanja modal tahun anggaran 2021 dapat ditunjukkan dalam gambar 3.5 sebagai berikut :

GAMBAR 3.5
PROPORSI BELANJA MODAL TA 2021

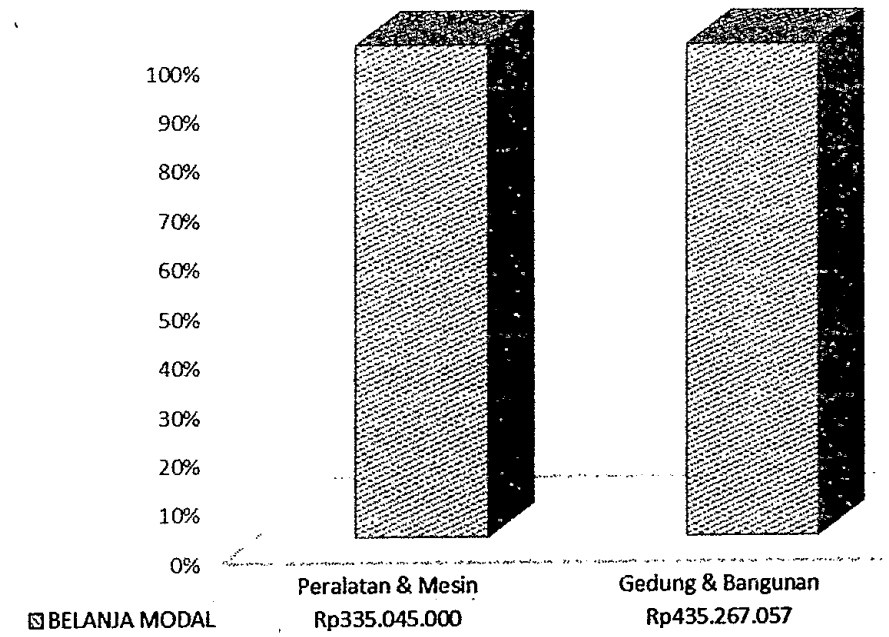

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja BPKAD TA 2021

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, yakni sebagai berikut :

1. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari retribusi jasa usaha hanya terserap sebesar 51,55% karena tidak adanya pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah akibat pandemi covid 19 dan tidak dilaksanakannya ibadah haji tahun 2021 sehingga menyebabkan pendapatan retribusi menurun.
2. Belanja perjalanan dinas luar daerah hanya terserap sebesar 88,45% karena untuk mendukung pemerintah dalam upaya pembatasan kegiatan keluar kota demi menekan laju penyebaran covid 19.

BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis Akrual sejak tahun 2016. Kebijakan tersebut tertuang dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
2. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas akuntansi, menyusun komponen laporan keuangan pokok yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
4. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, dan laporan perubahan ekuitas.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pada laporan realisasi anggaran, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja daerah, sedangkan pada neraca basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dan rekening kas umum daerah Pemerintah Provinsi Jawa.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.3.1.1 Pendapatan –LO

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.1.2 Pendapatan – LRA

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Beban

4.3.2.1 Beban Operasi

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.

b. Beban Barang & Jasa

1. Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat pada saat pembelian persediaan, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban persediaan

2. Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga setelah disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

4. Beban Subsidi

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

6. Beban Bantuan Sosial

   Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

7. Beban Penyusutan Aset Tetap/Amrtisasi

   Merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap/aset tak berwujud yang dapat disusutkan/diamortisasikan selama masa manfaat aset yang bersangkutan

8. Beban Penyisihan Piutang

   Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang

4.3.2.2 Beban Transfer

merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
3. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah.
4. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
5. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari Silpa tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya.
2. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh dan SKPD.
2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO.
3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari

tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.

5. Berdasarkan unit pengelolanya maka kas pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
   a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah :
      1. Merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
      2. Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid
   b. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD.

      Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD) dan Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah.
6. Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas dan penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
8. Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan, diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Piutang

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang lainnya.

3. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi dan piutang PAD yang sah.
4. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo.
5. Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut.
6. Piutang PAD yang Sah meliputi Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, Piutang Badan Layanan Umum Daerah dan Piutang Bunga Deposito. Piutang Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antata pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit.
7. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain.
8. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini antara lain transfer pemerintah pusat lainnya seperti Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya.
9. Piutang lainnya diklasifikasikan dalam piutang tuntutan ganti rugi daerah dan piutang berdasarkan peristiwa lainnya.

10. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Negara.
11. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

    Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO. Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/umur piutang sebagai berikut :

Lama menunggak	**Kategori**	**% diragukan Tertagih**
- 0 tahun sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5%
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar	10%
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan	50%
- Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

12. Penghentian Pengakuan Piutang

    Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (*write off*). Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
13. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan

Atas penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

14. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.3.7 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

1. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.
2. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis terkonsumsi pada periode pelaporan.
3. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.
4. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.
5. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

4.3.8 Kebijakan Akuntansi Investasi

4.3.8.1 Investasi Jangka Pendek

1. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

2. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
3. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) dan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
4. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO.

4.3.8.2 Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
2. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen.
3. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.
4. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO.

4.3.9 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Barang Persediaan dapat terdiri dari :
   a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor,suku cadang; barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
   b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat;
   c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat;
   d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
4. Persediaan diakui pada saat :
   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan didalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral.
   b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

   Pada akhir periode pelaporan jumlah persediaan diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*).
5. Pengukuran persediaan dilakukan dengan metode biaya perolehan, harga pokok produksi dan nilai wajar.
6. Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar.

7. Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:
   a. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   b. Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan.

4.3.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
3. Klasifikasi Aset Tetap adalah : Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan; Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
4. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap :
   a. Berwujud;
   b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
   e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
6. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
7. Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut :
   a. Kepemilikan atas aset tetap ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dalam hal ini misalnya ditandai dengan sertifikat tanah, berita acara serah terima pekerjaan dan bukti kepemilikan

lain yang sah dan sesuai perundang-undangan. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti kepemilikan, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah dan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, misalnya telah terjadi pembayaran dan/ atau penguasaan atas aset tetap sudah beralih dari pemilik sebelumnya kepada entitas.

b. Pengadaan aset tetap pemerintah yang sehjak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

c. Tanah yang tercatat di neraca pemerintah daerah, namun masih dalam sengketa berupa belum adanya bukti kepemilikan sah dan kepemilikan ganda yang dikuasai dan/ atau digunakan oleh pihak lain atau entitas pemerintah lain maka tanah tersebut diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

8. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
9. Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset *ekstrakomtable* dan berlaku sejak ditetapkan. Aset *ekstrakomtable* tidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
10. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan *(carrying amount)*. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran *(expenses)* pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.
11. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.
12. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan

pembangunan/pengerjaan/ konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

13. KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen.
14. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertaggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
15. Aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
16. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* (tidak terpakai), disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
17. Perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat

disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.

18. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan untuk menghitung penyusutan adalah sebagi berikut :

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

    a. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
    b. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan.

19. Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
20. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
21. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
22. Penyajian aset bersejarah (*heritage assets*) tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK.
23. Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

4.3.11 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

2. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan.
3. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.
4. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

4.3.12 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan antara lain aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi daerah, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain-lain.
2. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.
3. Jenis-jenis aset tak berwujud adalah *Goodwill*, hak paten dan hak cipta, royalty, software, lisensi dan *franchise*, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, aset tidak berwujud lainnya dan aset tidak berwujud dalam pengerjaan.
4. Sesuatu dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
   a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
   b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
5. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
6. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
7. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatanya. Amortisasi dibagi menjadi Amortisasi

atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.

8. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :

$$\text{amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasikan}}{\text{Masa manfaat}}$$

   a. Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).
   b. Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.

9. Suatu Aset Tak Berwujud harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian Aset Tak Berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru.
10. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya".
11. Aset tak berwujud diungkapkan dalam Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :
    a. Masa manfaat dan metode amortisasi;
    b. Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud;
    c. Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
12. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan yang dilakukan secara angsuran.
13. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani.
14. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
15. Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.

16. Tuntutan ganti rugi daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
17. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Non Bendahara terdiri dari :
    a. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah. Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
    b. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi Daerah. Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan piutang ganti rugi pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan.
    c. Pengakuan Beban
       Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara atau non bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
18. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya" dan informasi yang perlukan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
19. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, kemitraan dengan pihak ketiga dan tuntutan ganti rugi.
20. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Contoh: penghentian penggunaan aset tetap pemerintah dapat disebabkan karena rusak berat/usang; aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah; aset lain-lain lainnya antara lain aset tetap yang sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
21. Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

22. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.13 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang/jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah.
2. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu (12) dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
5. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari (12) dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
6. Kewajiban jangka panjang antara lain terdiri dari utang dalam negeri merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pinjaman dari lembaga perbankan atau non perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan utang jangka panjang Lainnya merupakan utang yang tidak dapat dikategorikan dalam kelompok utang diatas.
7. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Termasuk pendapatan diterima dimuka adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi *financial technology*.
8. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban kontijensi diakui saat peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini.

9. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
10. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK.

4.3.14 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
2. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
   a. Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
   b. Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.
3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca.
4. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
5. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan CaLK.

4.3.15 Kebijakan Akuntansi Koreksi

1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
2. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
   a. Kesalahan tidak berulang
      - adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, terdiri atas kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.
- Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan ini terjadi pada saat yang berbeda, yaitu :

1. Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
2. Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban).

a. Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;

b. Belanja dan Beban

- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA.
- Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada

periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

c. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

d. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

e. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

f. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

b. Kesalahan berulang dan sistemik

- Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Bab 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2021 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD TA 2021. Anggaran dan realisasi APBD TA 2021 adalah sebagai berikut:

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH — Rp88.727.499.435,00

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp172.112.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp88.727.499.435,00 atau 51,55 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 122.416.456.320,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp33.688.956.885,00 atau 27,52 % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah	172.112.520.000,00	88.727.499.435,00	51,55	122.416.456.320,00	(33.688.956.885,00)	(27,52)
2	Pendapatan Transfer	-	-	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**172.112.520.000,00**	**88.727.499.435,00**	**51,55**	**122.416.456.320,00**	**(33.688.956.885,00)**	**(27,52)**

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) — Rp88.727.499.435,00

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp172.112.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp88.727.499.435,00 atau 51,55 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp122.416.456.320,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp33.688.956.885,00 atau 27,52 % :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.547.020.000,00	1.903.488.640,00	29,07	2.515.537.278,00	(612.048.638,00)	(24,33)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Lain-Lain PAD yang Sah	165.565.500.000,00	86.824.010.795,00	52,44	119.900.919.042,00	(33.076.908.247,00)	(27,59)
	Jumlah	**172.112.520.000,00**	**88.727.499.435,00**	**51,55**	**122.416.456.320,00**	**(33.688.956.885,00)**	**(27,52)**

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah **Rp1.903.488.640,00**

Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp6.547.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.903.488.640,00 atau 29,07 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.515.537.278,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp612.048.638,00 atau 24,33%. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-	-
2	Retribusi Jasa Usaha	6.547.020.000,00	1.903.488.640,00	29,07	2.515.537.278,00	(612.048.638,00)	(24,33)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**6.547.020.000,00**	**1.903.488.640,00**	**29,07**	**2.515.537.278,00**	**(612.048.638,00)**	**(24,33)**

5.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha **Rp1.903.488.640,00**

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp6.547.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.903.488.640,00 atau 29,07 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.515.537.278,00,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp612.048.638,00,00 atau 24,33% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.530.645.000,00	1.903.488.640,00	124,36	1.835.427.278,00	68.061.362,00	3,71
2	Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	-	-	-
3	Retribusi Terminal	-	-	-	-	-	-
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	5.016.375.000,00	-	-	680.110.000,00	(680.110.000,00)	(100,00)
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	-	-	-	-	-	-
6	Retribusi Kepelabuhan	-	-	-	-	-	-
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-	-	-	-
8	Retribusi Penyeberangan di Air	-	-	-	-	-	-
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**6.547.020.000,00**	**1.903.488.640,00**	**29,07**	**2.515.537.278,00**	**(612.048.638,00)**	**(24,33)**

5.1.1.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah **Rp1.903.488.640,00**

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp1.530.645.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.903.488.640,00 atau 124,36 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.835.427.278,00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp68.061.362,00 atau 3,71% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.182.247.000,00	1.903.488.640,00	161,01	1.473.868.733,00	429.619.907,00	29,15
2	Retribusi Penyewaan Tanah	-	-	-	-	-	-
3	Retribusi Penyewaan Bangunan	-	-	-	-	-	-
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium	-	-	-	-	-	-
5	Retribusi Pemakaian Ruangan	348.398.000,00	-	-	361.558.545,00	(361.558.545,00)	(100,00)
6	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-	-
7	Retribusi Pemakaian Alat	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1.530.645.000,00**	**1.903.488.640,00**	**124,36**	**1.835.427.278,00**	**68.061.362,00**	**3,71**

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah **melebihi/ mencapai target** dikarenakan adanya pendapatan pendapatan diterima dimuka atas pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berada dibeberapa kota di Jawa Tengah, seperti Kabupaten Semarang, Magelang, Sragen, Pati, Batang, Boyolali, Banyumas dan Kota Salatiga.

5.1.1.1.2.1.2 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Rp0,00

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditargetkan sebesar Rp5.016.375.000,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp680.110.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp680.110.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila	5.016.375.000,00	-	-	680.110.000,00	(680.110.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**5.016.375.000,00**	**-**	**-**	**680.110.000,00**	**(680.110.000,00)**	**(100,00)**

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa **tidak mencapai target** dikarenakan adanya penundaan ibadah haji tahun 2021 dan tidak disewakannya penginapan yang berada di Asrama Donohudan Boyolali untuk mendukung upaya Pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid 19 di Jawa Tengah.

5.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp86.824.010.795,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp165.565.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp86.824.010.795,00 atau 52,44 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp199.900.919.042,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp33.076.908.247,00 atau 27,59 % dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	565.500.000,00	914.674.250,00	161,75	614.477.520,00	300.196.730,00	48,85
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Jasa Giro	40.000.000.000,00	33.421.665.370,00	83,55	43.049.831.808,00	(9.628.166.438,00)	(22,37)
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-	-
7	Pendapatan Bunga	125.000.000.000,00	52.487.671.175,00	41,99	76.236.609.714,00	(23.748.938.539,00)	(31,15)
8	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	-	-	-	-	-
10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-	-
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-	-	-
12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-
14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	-	-	-
15	Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	-	-
16	Pendapatan BLUD	-	-	-	-	-	-
17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	-	-	-
19	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	-	-	-	-	-
20	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	-	-	-
21	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf	-	-	-	-	-	-
22	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa	-	-	-	-	-	-
23	Pendapatan Lain-Lain SKPKD	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**165.565.500.000,00**	**86.824.010.795,00**	**52,44**	**119.900.919.042,00**	**(33.076.908.247,00)**	**(27,59)**

5.1.1.1.3.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan — Rp914.674.250,00

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp565.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp914.674.250,00 atau 161,75%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar

Rp614.477.520,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp300.196.730,00 atau 48,85% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Hasil Penjualan Tanah	-	-	-	-	-	-
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	415.500.000,00	130.149.400,00	31,32	238.835.520,00	(108.686.120,00)	(45,51)
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
4	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
5	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	150.000.000,00	651.644.250,00	434,43	375.642.000,00	276.002.250,00	73,47
6	Hasil Penjualan Aset Lainnya	-	132.880.600,00	-	-	132.880.600,00	-
	Jumlah	**565.500.000,00**	**914.674.250,00**	**161,75**	**614.477.520,00**	**300.196.730,00**	**48,85**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan **melebihi/mencapai target** dikarenakan adanya setoran dari penjualan CT Scan RSUD Tugurejo, penjualan bongkaran gedung RSUD Moewardi dan bongkaran Gedung RSJD Surakarta.

5.1.1.1.3.2 Jasa Giro — Rp33.421.665.370,00

Jasa Giro ditargetkan sebesar Rp40.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp33.421.665.370,00 atau 83,55%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp43.049.831.808,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp9.628.166.438,00,00 atau 22,37 % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Jasa Giro pada Kas Daerah	40.000.000.000,00	33.421.665.370,00	83,55	43.049.831.808,00	(9.628.166.438,00)	(22,37)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	-	-	-	-	-
3	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
4	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	-	-	-	-	-
5	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**40.000.000.000,00**	**33.421.665.370,00**	**83,55**	**43.049.831.808,00**	**(9.628.166.438,00)**	**(22,37)**

Jasa Giro **tidak mencapai target** dikarenakan penyerapan belanja yang bagus sehingga *idle cash* yang berada di rekening giro bersaldo minimal, selain hal tersebut juga karena tingkat suku bunga giro bank yang rendah sebagai akibat dari penurunan suku bunga acuan BI.

5.1.1.1.3.3 Pendapatan Bunga — Rp52.487.671.175,00

Pendapatan Bunga ditargetkan sebesar Rp125.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp52.487.671.175,00 atau 41,99%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp76.236.609.714,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp23.748.938.539,00 atau 31,15% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	125.000.000.000,00	52.487.671.175,00	41,99	76.236.609.714,00	(23.748.938.539,00)	(31,15)
	Jumlah	**125.000.000.000,00**	**52.487.671.175,00**	**41,99**	**76.236.609.714,00**	**(23.748.938.539,00)**	**(31,15)**

Pendapatan Bunga **tidak mencapai target** dikarenakan penyerapan belanja yang bagus sehingga *idle cash* yang dapat di investasikan dalam deposito menjadi terbatas, selain hal tersebut juga karena tingkat suku bunga deposito bank yang rendah sebagai akibat dari penurunan suku bunga acuan BI.

5.1.2 BELANJA DAERAH — Rp41.288.392.116,00

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp43.341.801.000,00 dengan realisasi sebesar Rp41.288.392.116,00 atau 95,26%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp48.504.674.736,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp7.216.282.620,00 atau 14,88% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Operasional	42.500.495.000,00	40.506.080.059,00	95,31	47.453.514.236,00	(6.947.434.177,00)	(14,64)
2	Belanja Modal	841.306.000,00	782.312.057,00	92,99	1.051.160.500,00	(268.848.443,00)	(25,58)
3	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**43.341.801.000,00**	**41.288.392.116,00**	**95,26**	**48.504.674.736,00**	**(7.216.282.620,00)**	**(14,88)**

5.1.2.1 BELANJA OPERASIONAL — Rp40.506.080.059,00

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp42.500.495.000,00 dengan realisasi sebesar Rp40.506.080.059,00,00 atau 95,31%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp47.453.514.236,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp6.947.434.177,00 atau 14,64% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	19.133.606.000,00	17.801.536.467,00	93,04	31.095.020.825,00	(13.293.484.358,00)	(42,75)
2	Belanja Barang dan						

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
	Jasa	23.366.889.000,00	22.704.543.592,00	97,17	16.358.493.411,00	6.346.050.181,00	38,79
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**42.500.495.000,00**	**40.506.080.059,00**	**95,31**	**47.453.514.236,00**	**(6.947.434.177,00)**	**(14,64)**

5.1.2.1.2 Belanja Pegawai — Rp17.801.536.467,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp19.133.606.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.801.536.467,00 atau 93,04%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp31.095.020.825,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp13.293.484.358,00 atau 42,75% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.183.606.000,00	8.851.536.467,00	86,92	9.231.803.106,00	(380.266.639,00)	(4,12)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.950.000.000,00	8.950.000.000,00	100,00	9.536.648.347,00	(586.648.347,00)	(6,15)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	12.326.569.372,00	(12.326.569.372,00)	(100,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Pegawai BLUD	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**19.133.606.000,00**	**17.801.536.467,00**	**93,04**	**31.095.020.825,00**	**(13.293.484.358,00)**	**(42,75)**

Belanja Pegawai **tidak mencapai target** dikarenakan anggaran Tambahan Penghasilan ASN 13 dan 14 tidak jadi dibayarkan.

5.1.2.1.2.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN — Rp8.851.536.467,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp10.183.606.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.851.536.467,00 atau 86,92%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar

Rp9.231.803.106,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp380.266.639,00 atau 4,12% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	7.611.036.000,00	6.931.447.992,00	91,07	7.006.222.900,00	(74.774.908,00)	(1,07)
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	550.000.000,00	512.019.484,00	93,09	605.854.906,00	(93.835.422,00)	(15,49)
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	220.000.000,00	210.450.000,00	95,66	242.250.000,00	(31.800.000,00)	(13,13)
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	215.000.000,00	81.180.000,00	37,76	60.240.000,00	20.940.000,00	34,76
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	230.000.000,00	225.755.000,00	98,15	293.880.000,00	(68.125.000,00)	(23,18)
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	315.000.000,00	309.160.980,00	98,15	321.255.120,00	(12.094.140,00)	(3,76)
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	43.000.000,00	21.791.412,00	50,68	22.612.401,00	(820.989,00)	(3,63)
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	100.000,00	74.130,00	74,13	97.004,00	(22.874,00)	(23,58)
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	944.470.000,00	514.406.175,00	54,47	621.804.031,00	(107.397.856,00)	(17,27)
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	15.000.000,00	11.312.823,00	75,42	57.586.744,00	(46.273.921,00)	(80,36)
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	40.000.000,00	33.938.471,00	84,85	-	33.938.471,00	-
12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**10.183.606.000,00**	**8.851.536.467,00**	**86,92**	**9.231.803.106,00**	**(380.266.639,00)**	**(4,12)**

5.1.2.1.2.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN **Rp8.950.000.000,00**

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp8.950.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.950.000.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9.536.648.347,00,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp586.648.347,00 atau 6,15% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.950.000.000,00	8.950.000.000,00	100,00	9.536.648.347,00	(586.648.347,00)	(6,15)
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	-	-	-	-	-	-
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-
4	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	-	-	-	-	-	-
5	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**8.950.000.000,00**	**8.950.000.000,00**	**100,00**	**9.536.648.347,00**	**(586.648.347,00)**	**(6,15)**

5.1.2.1.3 Belanja Barang dan Jasa — Rp22.704.543.592,00

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp23.366.889.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.704.543.592,00 atau 97,17%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16.358.493.411,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.346.050.181,00 atau 38,79 % dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Barang	4.920.562.000,00	4.792.990.962,00	97,41	3.351.989.215,00	1.441.001.747,00	42,99
2	Belanja Jasa	13.580.187.000,00	13.169.924.593,00	96,98	6.189.128.102,00	6.980.796.491,00	112,79
3	Belanja Pemeliharaan	844.573.000,00	833.663.757,00	98,71	2.950.694.841,00	(2.117.031.084,00)	(71,75)
4	Belanja Perjalanan Dinas	4.021.567.000,00	3.907.964.280,00	97,18	3.866.681.253,00	41.283.027,00	1,07
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Barang dan Jasa BOP	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**23.366.889.000,00**	**22.704.543.592,00**	**97,17**	**16.358.493.411,00**	**6.346.050.181,00**	**38,79**

5.1.2.1.3.1 Belanja Barang — Rp4.792.990.962,00

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp4.920.562.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.792.990.962,00 atau 97,41%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.351.989.215,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.441.001.747,00 atau 42,99% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	4.920.562.000,00	4.792.990.962,00	97,41	3.351.989.215,00	1.441.001.747,00	42,99
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Barang Bekas Dipakai	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**4.920.562.000,00**	**4.792.990.962,00**	**97,41**	**3.351.989.215,00**	**1.441.001.747,00**	**42,99**

5.1.2.1.3.2 Belanja Jasa — Rp13.169.924.593,00

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp13.580.187.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.169.924.593,00 atau 96,98%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.189.128.102,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.980.796.491,00 atau 112,79% dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Jasa Kantor	11.993.627.000,00	11.705.489.192,00	97,60	4.986.868.695,00	6.718.620.497,00	134,73
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	257.860.000,00	152.698.401,00	59,22	262.263.407,00	(109.565.006,00)	(41,78)
3	Belanja Sewa Tanah	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	60.000.000,00	52.800.000,00	88,00	142.190.000,00	(89.390.000,00)	(62,87)
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-	-	-	-
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	-	-	-	37.464.000,00	(37.464.000,00)	(100,00)
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	35.300.000,00	34.720.000,00	98,36	70.767.000,00	(36.047.000,00)	(50,94)
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.233.400.000,00	1.224.217.000,00	99,26	689.575.000,00	534.642.000,00	77,53
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Aveilibility Payment*)	-	-	-	-	-	-
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	-	-	-	-	-
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan PNS/PPPK	-	-	-	-	-	-
13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**13.580.187.000,00**	**13.169.924.593,00**	**96,98**	**6.189.128.102,00**	**6.980.796.491,00**	**112,79**

5.1.2.1.3.3 Belanja Pemeliharaan — Rp833.663.757,00

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp844.573.000,00 dengan realisasi sebesar Rp833.663.757,00 atau 98,71%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.950.694.841,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.117.031.084,00 atau 71,75% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	451.350.000,00	447.383.059,00	99,12	848.257.255,00	(400.874.196,00)	(47,26)
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	393.223.000,00	386.280.698,00	98,23	1.805.085.916,00	(1.418.805.218,00)	(78,60)
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	297.351.670,00	(297.351.670,00)	(100,00)

5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**844.573.000,00**	**833.663.757,00**	**98,71**	**2.950.694.841,00**	**(2.117.031.084,00)**	**(71,75)**

5.1.2.1.3.4 Belanja Perjalanan Dinas — Rp3.907.964.280,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp4.021.567.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.907.964.280,00 atau 97,18%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.866.681.253,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp41.283.027,00 atau 1,07% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	4.021.567.000,00	3.907.964.280,00	97,18	3.866.681.253,00	41.283.027,00	1,07
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**4.021.567.000,00**	**3.907.964.280,00**	**97,18**	**3.866.681.253,00**	**41.283.027,00**	**1,07**

5.1.2.2 BELANJA MODAL — Rp782.312.057,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp841.306.000,00 dengan realisasi sebesar Rp782.312.057,00 atau 92,99%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.051.160.500,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp268.848.443,00 atau 25,58% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	390.800.000,00	347.045.000,00	88,80	617.570.500,00	(270.525.500,00)	(43,80)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	450.506.000,00	435.267.057,00	96,62	85.745.000,00	349.522.057,00	407,63
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	347.845.000,00	(347.845.000,00)	(100,00)
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**841.306.000,00**	**782.312.057,00**	**92,99**	**1.051.160.500,00**	**(268.848.443,00)**	**(25,58)**

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin — Rp347.045.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp390.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp347.045.000,00 atau 88,80%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp617.570.500,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp270.525.500,00 atau 43,80% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Besar	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Alat Angkutan	-	-	-	-	-	-
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-	12.000.000,00	-
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	29.865.000,00	(29.865.000,00)	(100,00)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-	-	-
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	-	-	-	-	-	-
9	Belanja Modal Alat Persenjataan	-	-	-	-	-	-
10	Belanja Modal Komputer	378.800.000,00	335.045.000,00	88,45	587.705.500,00	(252.660.500,00)	(42,99)
11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	-	-	-
12	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	-	-	-	-
13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-	-	-
14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-	-
15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-	-	-
16	Belanja Modal Alat Peraga	-	-	-	-	-	-
17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-	-	-
18	Belanja Modal Rambu-rambu	-	-	-	-	-	-
19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	-	-	-
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**390.800.000,00**	**347.045.000,00**	**88,80**	**617.570.500,00**	**(270.525.500,00)**	**(43,80)**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin **tidak mencapai target** dikarenakan belanja printer dotmatrik oleh bidang Perbendaharaan dan Kasda tidak dilaksanakan karena printer jenis tersebut sudah tidak digunakan lagi.

5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp12.000.000,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp12.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.000.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp 00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp12.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	-	12.000.000,00	-
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**12.000.000,00**	**12.000.000,00**	**100,00**	**-**	**12.000.000,00**	**-**

5.1.2.2.2 Belanja Modal Komputer **Rp335.045.000,00**

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp378.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp335.045.000,00 atau 88,45%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp587.705.500,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp252.660.500,00 atau 42,99% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Komputer Unit	278.800.000,00	276.045.000,00	99,01	587.705.500,00	(311.660.500,00)	(53,03)
2	Belanja Modal Peralatan Komputer	100.000.000,00	59.000.000,00	59,00	-	59.000.000,00	-
	Jumlah	**378.800.000,00**	**335.045.000,00**	**88,45**	**587.705.500,00**	**(252.660.500,00)**	**(42,99)**

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan **Rp435.267.057,00**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp450.506.000,00 dengan realisasi sebesar Rp435.267.057,00 atau 96,62%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp85.745.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp349.522.057,00 atau 407,63% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	175.000.000,00	163.314.057,00	93,32	54.483.000,00	108.831.057,00	199,75
2	Belanja Modal Monumen	-	-	-	31.262.000,00	(31.262.000,00)	(100,00)
3	Belanja Modal Bangunan Menara	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	275.506.000,00	271.953.000,00	98,71	-	271.953.000,00	-
	Jumlah	**450.506.000,00**	**435.267.057,00**	**96,62**	**85.745.000,00**	**349.522.057,00**	**407,63**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan **tidak mencapai target** dikarenakan efisiensi belanja modal gedung dan bangunan.

5.1.2.2.3.1 Belanja Modal Bangunan Gedung — Rp163.314.057,00

Belanja Modal Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp163.314.057,00 atau 93,32%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp54.483.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp108.831.057,00 atau 199,75% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2021 (Rp)	%	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	175.000.000,00	163.314.057,00	93,32	54.483.000,00	108.831.057,00	199,75
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**175.000.000,00**	**163.314.057,00**	**93,32**	**54.483.000,00**	**108.831.057,00**	**199,75**

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1 ASET — Rp134.394.435.634,65

Total Aset sebesar Rp134.394.435.634,65 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp136.880.958.118,17 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.486.522.483,52 atau 1,82%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Aset Lancar	143.947.043,58	286.753.925,08
2	Investasi Jangka Panjang	-	-
3	Aset Tetap	134.179.997.484,20	136.341.530.586,22
4	Dana Cadangan	-	-
5	Aset Lainnya	70.491.106,87	252.673.606,87
	Jumlah	**134.394.435.634,65**	**136.880.958.118,17**

5.2.1.1 ASET LANCAR — Rp143.947.043,58

Aset Lancar sebesar Rp143.947.043,58 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp286.753.925,08 mengalami **penurunan** sebesar Rp142.806.881,50 atau 49,80% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	-	-
2	Investasi Jangka Pendek	-	-
3	Piutang Pajak Daerah	-	-
4	Piutang Retribusi Daerah	32.041.600,00	32.041.600,00
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-
7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
8	Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
9	Piutang Lainnya	-	-
10	Penyisihan Piutang	(32.041.600,00)	(16.020.800,00)
11	Belanja Dibayar Dimuka	91.605.143,58	185.356.625,08
12	Persediaan	52.341.900,00	85.376.500,00
	Jumlah	**143.947.043,58**	**286.753.925,08**

5.2.1.1.1 Piutang Retribusi Daerah — Rp32.041.600,00

Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp32.041.600,00 jumlahnya tetap apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp32.041.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	-	-
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	32.041.600,00	32.041.600,00
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-
	Jumlah	**32.041.600,00**	**32.041.600,00**

5.2.1.1.1.1 Piutang Retribusi Jasa Usaha — Rp32.041.600,00

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp32.041.600,00 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp32.041.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.041.600,00	32.041.600,00
2	Piutang Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	-	-
3	Piutang Retribusi Terminal	-	-
4	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	-	-
5	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	-	-
6	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-
	Jumlah	**32.041.600,00**	**32.041.600,00**

5.2.1.1.1.1.1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah — Rp32.041.600,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp32.041.600,00 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp32.014.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	32.041.600,00	32.041.600,00
2	Piutang Retribusi Penyewaan Tanah	-	-
3	Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan	-	-
4	Piutang Retribusi Penyewaan Laboratorium	-	-
5	Piutang Retribusi Penyewaan Ruangan	-	-
6	Piutang Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor	-	-
7	Piutang Retribusi Pemakaian Alat	-	-
	Jumlah	**32.041.600,00**	**32.041.600,00**

5.2.1.1.2 Penyisihan Piutang — Rp32.041.600,00

Penyisihan Piutang sebesar Rp32.041.600,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.020.800,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp16.020.800,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(32.041.600,00)	(16.020.800,00)
2	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-
	Jumlah	**(32.041.600,00)**	**(16.020.800,00)**

5.2.1.1.2.1 Penyisihan Piutang Pendapatan — Rp32.041.600,00

Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp32.041.600,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.020.800,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp16.020.800,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	-
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(32.041.600,00)	(16.020.800,00)
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-
5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
6	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
7	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	-	-
	Jumlah	**(32.041.600,00)**	**(16.020.800,00)**

5.2.1.1.2.1.1 Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi — Rp32.041.600,00

Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi sebesar Rp32.041.600,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.020.800,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp16.020.800,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(32.041.600,00)	(16.020.800,00)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pelelangan	-	-
	Jumlah	**(32.041.600,00)**	**(16.020.800,00)**

	2021		2020	
	Piutang	**Cadangan**	**Piutang**	**Cadangan**
- Lancar				
- Menunggak 1-2 Tahun				
- Menunggak 2-3 Tahun				
- Menunggak 3-5 Tahun			32.041.600,00	(16.020.800,00)
- Menunggak lebih dari 5 tahun	32.041.600,00	(32.041.600,00)		
Jumlah	**32.041.600,00**	**(32.041.600,00)**	**32.041.600,00**	**(16.020.800,00)**

5.2.1.1.2.1.1.1 Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp32.041.600,00

Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp32.041.600,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.020.800,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp16.020.800,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(32.041.600,00)	(16.020.800,00)
2		-	-
	Jumlah	**(32.041.600,00)**	**(16.020.800,00)**

5.2.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka Rp91.605.143,58

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp91.605.143,58 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp185.356.625,08 mengalami **penurunan** sebesar Rp93.751.481,50 atau 50,58% dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka	91.605.143,58	185.356.625,08
	Beban Dibayar Dimuka	**91.605.143,58**	**185.356.625,08**

5.2.1.1.4 Persediaan Rp52.341.900,00

Persediaan sebesar Rp52.341.900,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp85.376.500,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp33.034.600,00 atau 38,69% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Barang Pakai Habis	52.341.900,00	85.376.500,00
2	Barang Tak Habis Pakai	-	-
3	Barang Bekas Pakai	-	-
	Jumlah	**52.341.900,00**	**85.376.500,00**

5.3.1.1.12.1 Barang Pakai Habis Rp52.341.900,00

Barang Pakai Habis sebesar Rp52.341.900,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp85.376.500,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp33.034.600,00 atau 38,69% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bahan	-	-
2	Suku Cadang	-	-
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	52.341.900,00	85.376.500,00
4	Obat-obatan	-	-
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	-	-

6	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	-	-
7	Natura dan Pakan	-	-
8	Persediaan Penelitian	-	-
9	Persediaan dalam Proses	-	-
	Jumlah	**52.341.900,00**	**85.376.500,00**

5.3.1.1.12.1.1 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor — Rp52.341.900,00

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp52.341.900,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp85.376.500,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp33.034.600,00 atau 38,69% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	51.891.900,00	85.376.500,00
2	Kertas dan Cover	-	-
3	Bahan Cetak	-	-
4	Benda Pos	450.000,00	-
5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-
6	Bahan Komputer	-	-
7	Perabot Kantor	-	-
8	Alat Listrik	-	-
9	Perlengkapan Dinas	-	-
10	Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	-	-
11	Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	-
12	Suvenir/Cendera Mata	-	-
13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	-
	Jumlah	**52.341.900,00**	**85.376.500,00**

5.2.1.2 Aset Tetap — Rp134.179.997.484,20

Aset Tetap sebesar Rp134.179.997.484,20 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp136.341.530.586,22 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.161.533.102,02 atau 1,59% dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Tanah	71.532.500.000,00	71.532.500.000,00
2	Peralatan dan Mesin	49.933.390.702,00	49.970.630.172,00
3	Gedung dan Bangunan	107.246.916.790,00	102.455.901.233,00
4	Jalan,Irigasi, dan Jaringan	426.369.083,00	438.769.083,00
5	Aset Tetap Lainnya	103.315.290,00	180.125.180,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	31.262.000,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(95.062.494.380,80)	(88.267.657.081,78)
	Jumlah	**134.179.997.484,20**	**136.341.530.586,22**

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	**224.609.187.668,00**
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	782.312.057,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	5.854.357.500,00

Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	3.727.148.599,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	16.545.000,00
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	**10.380.363.156,00**
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	101.305.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	3.727.148.599,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	1.871.635.360,00
Koreksi	Rp	46.970.000,00
Jumlah	Rp	**5.747.058.959,00**
Grand Total	Rp	**229.242.491.865,00**

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2021.
- ✓ Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2021 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- ✓ Mutasi Masuk adalah perpindahan aset antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2021.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ✓ Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
- ✓ Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
- ✓ Hibah adalah aset yang diberikan kepada Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- ✓ Mutasi keluar adalah perpindahan aset tetap antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama Tahun 2021.
- ✓ Koreksi adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

5.2.1.2.1 Tanah — Rp71.532.500,00

Tanah sebesar Rp71.532.500.000,00 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 71.532.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Tanah Persil	71.532.500.000,00	71.532.500.000,00
2	Tanah Non Persil	-	-
3	Lapangan	-	-
	Jumlah	**71.532.500.000,00**	**71.532.500.000,00**

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	71.532.500.000,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Berkurang		
Ekstrakomtabel	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Grand Total	Rp	**71.532.500.000,00**

5.2.1.2.1.1 Tanah Persil — Rp71.532.500,00

Tanah Persil sebesar Rp71.532.500.000,00 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 71.532.500.000,00 atau 100,00 % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	33.292.500.000,00	33.292.500.000,00
2	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	-	-

3	Tanah untuk Bangunan Industri	-	-
4	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	38.240.000.000,00	38.240.000.000,00
5	Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	-	-
6	Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	-	-
7	Tanah Persil Lainnya	-	-
	Jumlah	**71.532.500.000,00**	**71.532.500.000,00**

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin — Rp49.933.390.702,00

Peralatan dan Mesin sebesar Rp49.933.390.702,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp49.970.630.172,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp37.239.470,00 atau 0,07% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Alat Besar	3.632.655.360,00	3.729.455.360,00
2	Alat Angkutan	8.734.170.918,00	7.646.358.918,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
4	Alat Pertanian	26.295.000,00	28.280.000,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.913.728.829,00	26.749.992.299,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.303.054.757,00	2.705.132.757,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8	Alat Laboratorium	-	-
9	Alat Persenjataan	-	-
10	Komputer	9.323.485.838,00	9.111.410.838,00
11	Alat Eksplorasi	-	-
12	Alat Pengeboran	-	-
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
14	Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15	Alat Keselamatan Kerja	-	-
16	Alat Peraga	-	-
17	Peralatan Proses/Produksi	-	-
18	Rambu-rambu	-	-
19	Peralatan Olahraga	-	-
	Jumlah	**49.933.390.702,00**	**49.970.630.172,00**

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	49.970.630.172,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	347.045.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	1.120.592.000,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	291.935.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	545.000,00
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	**1.760.117.000,00**

Berkurang

Ekstrakomtabel	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	291.935.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	1.505.421.470,00
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	**1.797.356.470,00**
Grand Total	Rp	**49.933.390.702,00**

5.2.1.2.2.1 Alat Besar — Rp3.632.655.360,00

Alat Besar sebesar Rp3.632.655.360,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.729.455.360,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp96.800.000,00 atau 2,60% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Alat Besar Darat	-	-
2	Alat Besar Apung	-	-
3	Alat Bantu	3.632.655.360,00	3.729.455.360,00
	Jumlah	**3.632.655.360,00**	**3.729.455.360,00**

5.2.1.2.2.2 Alat Angkutan — Rp8.734.170.918,00

Alat Angkutan sebesar Rp8.734.170.918,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.646.358.918,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.087.812.000,00 atau 14,23% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	8.612.690.918,00	7.524.878.918,00
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	121.480.000,00	121.480.000,00
3	Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-
4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-	-
6	Alat Angkutan Bermotor Udara	-	-
	Jumlah	**8.734.170.918,00**	**7.646.358.918,00**

5.2.1.2.2.3 Alat Pertanian — Rp26.295.000,00

Alat Pertanian sebesar Rp26.295.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp28.280.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.985.000,00 atau 7,02% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Alat Pengolahan	26.295.000,00	28.280.000,00
	Jumlah	**26.295.000,00**	**28.280.000,00**

5.2.1.2.2.4 Alat Kantor dan Rumah Tangga — Rp25.913.728.829,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp25.913.728.829,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.749.992.299,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp836.263.470,00 atau 3,13% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Alat Kantor	2.006.192.060,00	2.477.645.030,00
2	Alat Rumah Tangga	23.342.870.010,00	23.613.714.010,00
3	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	564.666.759,00	658.633.259,00
	Jumlah	**25.913.728.829,00**	**26.749.992.299,00**

5.2.1.2.2.5 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar — Rp2.303.054.757,00

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp2.303.054.757,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.705.132.757,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp402.078.000,00 atau 14,86% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Alat Studio	1.790.384.760,00	1.933.052.760,00
2	Alat Komunikasi	464.037.997,00	601.687.997,00
3	Peralatan Pemancar	48.632.000,00	170.392.000,00
4	Peralatan Komunikasi Navigasi	-	-
	Jumlah	**2.303.054.757,00**	**2.705.132.757,00**

5.2.1.2.2.6 Komputer — Rp9.323.485.838,00

Komputer sebesar Rp9.323.485.838,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.111.410.838,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp212.075.000,00 atau 2,33% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Komputer Unit	4.400.951.695,00	4.162.086.695,00
2	Peralatan Komputer	4.922.534.143,00	4.949.324.143,00
	Jumlah	**9.323.485.838,00**	**9.111.410.838,00**

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan — Rp107.246.916.790,00

Gedung dan Bangunan sebesar Rp107.246.916.790,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp102.455.901.233,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.791.015.557,00 atau 4,68% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bangunan Gedung	90.908.355.606,00	86.320.950.049,00
2	Monumen	846.935.000,00	846.935.000,00
3	Bangunan Menara	-	-
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	15.491.626.184,00	15.288.016.184,00
	Jumlah	**107.246.916.790,00**	**102.455.901.233,00**

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	102.455.901.233,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	435.267.057,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	4.733.765.500,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	3.435.075.474,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	16.000.000,00

Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	**8.620.108.031,00**
Berkurang		
Ekstrakomtabel	Rp	101.305.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	3.403.813.474,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	277.004.000,00
Koreksi	Rp	46.970.000,00
Jumlah	Rp	**3.829.092.474,00**
Grand Total	Rp	**107.246.916.790,00**

5.2.1.2.3.1 Bangunan Gedung — Rp90.908.355.606,00

Bangunan Gedung sebesar Rp90.908.355.606,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp86.320.950.049,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.587.405.557,00 atau 5,31% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	29.372.609.335,00	21.373.390.304,00
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	61.535.746.271,00	64.947.559.745,00
	Jumlah	**90.908.355.606,00**	**86.320.950.049,00**

5.2.1.2.3.2 Monumen — Rp846.935.000,00

Monumen sebesar Rp846.935.000,00 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp846.935.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	846.935.000,00	846.935.000,00
	Jumlah	**846.935.000,00**	**846.935.000,00**

5.2.1.2.3.3 Tugu Titik Kontrol/Pasti — Rp15.491.626.184,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp15.491.626.184,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.288.016.184,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp203.610.000,00 atau 1,33% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Tugu/Tanda Batas	15.491.626.184,00	15.288.016.184,00
	Jumlah	**15.491.626.184,00**	**15.288.016.184,00**

5.2.1.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan — Rp426.369.083,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp426.369.083,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp438.479.083,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp12.400.000,00 atau 2,83% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	-	-
2	Bangunan Air	10.150.000,00	10.150.000,00
3	Instalasi	416.219.083,00	416.219.083,00
4	Jaringan	-	12.400.000,00
	Jumlah	**426.369.083,00**	**438.769.083,00**

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	438.769.083,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Berkurang		
Ekstrakomtabel	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	12.400.000,00
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	**12.400.000,00**
Grand Total	Rp	**426.369.083,00**

Rp10.150.000,00

5.2.1.2.4.1 Bangunan Air

Bangunan Air sebesar Rp10.150.000,00 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.150.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bangunan Air Irigasi	10.150.000,00	10.150.000,00
2	Bangunan Pengairan Pasang Surut	-	-
3	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	-	-
4	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	-	-
6	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	-	-
7	Bangunan Air Bersih/Air Baku	-	-
5	Bangunan Air Kotor	-	-
	Jumlah	**10.150.000,00**	**10.150.000,00**

Rp416.219.083,00

5.2.1.2.4.2 Instalasi

Instalasi sebesar Rp416.219.083,00 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp416.219.083,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Instalasi Air Bersih/Air Baku	81.460.597,00	81.460.597,00
2	Instalasi Air Kotor	-	-
3	Instalasi Pengolahan Sampah	-	-
4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	-	-
6	Instalasi Pembangkit Listrik	-	-
7	Instalasi Gardu Listrik	253.909.513,00	253.909.513,00
5	Instalasi Pertahanan	80.848.973,00	80.848.973,00
8	Instalasi Gas	-	-
9	Instalasi Pengaman	-	-
10	Instalasi Lain	-	-
	Jumlah	**416.219.083,00**	**416.219.083,00**

5.2.1.2.4.3 Jaringan — Rp,00

Jaringan sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.400.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp12.400.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Jaringan Air Minum	-	-
2	Jaringan Listrik	-	-
3	Jaringan Telepon	-	12.400.000,00
4	Jaringan Gas	-	-
	Jumlah	**-**	**12.400.000,00**

5.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya — Rp103.315.290,00

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp103.315.290,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp180.125.180,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp76.809.890,00 atau 42,64% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	9.078.000,00	85.887.890,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	94.237.290,00	94.237.290,00
3	Hewan	-	-
4	Biota Perairan	-	-
5	Tanaman	-	-
6	Barang Koleksi Non Budaya	-	-
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
	Jumlah	**103.315.290,00**	**180.125.180,00**

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	180.125.180,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	138.125,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-

Jumlah	Rp	**138.125,00**
Berkurang		
Ekstrakomtabel	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	138.125,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	76.809.890,00
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	**76.948.015,00**
Grand Total	Rp	**103.315.290,00**

5.2.1.2.5.1 Bahan Perpustakaan — Rp9.078.000,00

Bahan Perpustakaan sebesar Rp9.078.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp85.887.890,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp76.809.890,00 atau 89,43% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	9.078.000,00	85.887.890,00
2	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	-	-
3	Kartografi, Naskah dan Lukisan	-	-
4	Musik	-	-
6	Karya Grafika (Graphic Material)	-	-
7	Three Dimensional Artifacts and Realita	-	-
5	Tarscalt	-	-
	Jumlah	**9.078.000,00**	**85.887.890,00**

5.2.1.2.5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga — Rp94.237.290,00

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp94.237.290,00 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp94.237.290,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Barang Bercorak Kesenian	93.876.875,00	94.000.000,00
2	Alat Bercorak Kebudayaan	360.415,00	237.290,00
3	Tanda Penghargaan	-	-
	Jumlah	**94.237.290,00**	**94.237.290,00**

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan — Rp95.062.494.380,80

Akumulasi Penyusutan sebesar Rp95.062.494.380,80 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp88.267.657.081,78 mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.794.837.299,02 atau 7,70% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(45.290.331.362,83)	(42.999.872.317,00)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(49.611.993.397,42)	(45.115.493.617,66)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan,	(160.169.620,55)	(152.291.147,12)

	dan Irigasi		
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
	Jumlah	**(95.062.494.380,80)**	**(88.267.657.081,78)**

5.2.1.2.6.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin **Rp45.290.331.362,83**

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp45.290.331.362,83 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp42.999.872.317,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.290.459.045,83 atau 5,33% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(2.717.496.110,01)	(2.566.776.985,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(7.357.684.983,00)	(5.680.733.848,00)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(26.295.000,00)	(28.280.000,00)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(24.922.863.829,01)	(24.990.533.739,00)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(2.127.974.957,00)	(2.402.270.157,00)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(8.138.016.483,81)	(7.331.277.588,00)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Rambu-rambu	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-
	Jumlah	**(45.290.331.362,83)**	**(42.999.872.317,00)**

5.2.1.2.6.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar **Rp2.717.496.110,01**

Akumulasi Penyusutan Alat Besar sebesar Rp2.717.496.110,01 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.566.776.985,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp150.719.125,01 atau 5,87% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Excavator	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Pile Driver	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Hauler	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Compacting Equipment	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Aggregate and Concrete Equipment	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Loader	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	-	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Dreger	-	-
14	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- Floating Excavator	-	-
15	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung- Amphibi Dredger	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Kapal Tarik	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Mesin	-	-
18	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Penarik	-	-
21	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Feeder	(223.475.875,00)	-
20	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Compressor	-	-
22	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	96.800.000,00	-
25	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	(24.043.250,01)	-
23	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Bor	-	-
24	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	-	-
26	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Pengolahan Air Kotor	-	-
27	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	-	-
28	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	-	-
29	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Mesin Tatoo	-	-
30	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Perlengkapan Kebakaran Hutan	-	-
31	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam	-	-
32	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	-	-
33	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen	-	-
34	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	(2.566.776.985,00)	(2.566.776.985,00)
	Jumlah	**(2.717.496.110,01)**	**(2.566.776.985,00)**

5.2.1.2.6.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan — Rp7.357.684.983,00

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan sebesar Rp7.357.684.983,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.680.733.848,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.676.951.135,00 atau 29,52% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(1.438.307.560,00)	-
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	(124.137.500,00)	-
3	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(48.650.625,00)	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(13.495.700,00)	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	(6.237.500,00)	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat	(46.122.250,00)	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Tempur	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Kereta Rel	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(5.680.733.848,00)	(5.680.733.848,00)
10	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	-	-
	Jumlah	**(7.357.684.983,00)**	**(5.680.733.848,00)**

5.2.1.2.6.1.3 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian — Rp26.295.000,00

Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian sebesar Rp26.295.000,00apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp28.280.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.985.000,00 atau 7,02% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	(28.280.000,00)	(28.280.000,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.985.000,00	-
3	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Panen	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Laboratorium Pertanian	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Processing	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	-	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	-	-
	Jumlah	**(26.295.000,00)**	**(28.280.000,00)**

5.2.1.2.6.1.4 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp24.922.863.829,01

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp24.922.863.829,01 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp24.990.533.739,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp67.669.909,99 atau 0,27% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	(24.965.153.739,00)	(24.990.533.739,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	219.256.000,00	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	185.237.970,00	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Meubelair	(92.731.932,00)	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat	37.184.999,99	-
9	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	(302.425.960,00)	-
10	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	26.550.000,00	-
11	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(47.449.400,00)	-
12	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	(19.715.400,00)	-
13	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	6.313.632,00	-
14	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
15	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	-	-
17	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5.370.000,00	-
18	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	-	-
19	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	24.700.000,00	-
	Jumlah	**(24.922.863.829,01)**	**(24.990.533.739,00)**

5.2.1.2.6.1.5 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp2.127.974.957,00

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp2.127.974.957,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.402.270.157,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp 274.295.200,00 atau 11,42% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	(2.395.355.457,00)	(2.402.270.157,00)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	6.897.000,00	-
3	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	5.175.000,00	-
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	137.650.000,00	-
8	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar MF/MW	98.100.000,00	-
9	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar HF/SW	-	-
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM	4.760.000,00	-
11	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar UHF	-	-
12	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF	-	-
13	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena MF/MW	-	-

14	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW	(4.101.500,00)	-
15	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Humidity Control	-	-
16	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Program Input Equipment	18.900.000,00	-
	Jumlah	**(2.127.974.957,00)**	**(2.402.270.157,00)**

5.2.1.2.6.1.6 Akumulasi Penyusutan Komputer Rp8.138.016.483,81

Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar Rp8.138.016.483,81 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.331.277.588,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp806.738.895,81 atau 11,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	(7.316.427.588,00)	(7.331.277.588,00)
2	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	(384.101.729,16)	-
3	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	(35.365.000,00)	-
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	(16.197.166,65)	-
5	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	(385.925.000,00)	-
8	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	-
	Jumlah	**(8.138.016.483,81)**	**(7.331.277.588,00)**

5.2.1.2.6.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp49.611.993.397,42

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp49.611.993.397,42 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp45.115.493.617,66 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.496.499.779,76 atau 9,97% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(47.030.029.624,08)	(42.859.622.368,00)
2	Akumulasi Penyusutan Monumen	(118.570.900,00)	(101.632.200,00)
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas	(2.463.392.873,34)	(2.154.239.049,66)
	Jumlah	**(49.611.993.397,42)**	**(45.115.493.617,66)**

5.2.1.2.6.2.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung — Rp47.030.029.624,08

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung sebesar Rp47.030.029.624,08 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp42.859.622.368,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.170.407.256,08 atau 9,73% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(45.704.701.089,42)	(42.859.622.368,00)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	(27.065.315,00)	-
3	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi	(5.284.920,00)	-
5	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	(6.994.148,52)	-
7	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Oseanarium/Observatorium	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	(13.578.356,02)	-
9	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	(189.889.141,54)	-
10	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	(790.600,00)	-
11	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	(27.345.584,89)	-
12	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Terbuka	(3.938.900,00)	-
13	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum	(279.223.000,00)	-
14	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman	(3.956.080,00)	-
15	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(1.097.763.745,94)	-
16	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	(986.476.665,90)	-
17	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.316.977.923,15	-
	Jumlah	**(47.030.029.624,08)**	**(42.859.622.368,00)**

5.2.1.2.6.2.2 Akumulasi Penyusutan Monumen Rp118.570.900,00

Akumulasi Penyusutan Monumen sebesar Rp118.570.900,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp101.632.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.938.700,00 atau 16,67% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	(16.938.700,00)	-
3	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	(101.632.200,00)	(101.632.200,00)
4	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	-	-
	Jumlah	**(118.570.900,00)**	**(101.632.200,00)**

5.2.1.2.6.2.3 Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp2.463.392.873,34

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp2.463.392.873,34 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.154.239.049,66 mengalami kenaikan sebesar Rp309.153.823,68 atau 14,35 % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Administrasi	(2.459.999.373,34)	(2.154.239.049,66)
2	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	(3.393.500,00)	-
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	-	-
	Jumlah	**(2.463.392.873,34)**	**(2.154.239.049,66)**

5.2.1.2.6.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp160.169.620,55

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp160.169.620,55 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp152.291.147,12 mengalami kenaikan sebesar Rp7.878.473,43 atau 5,17% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	-	-
2	Bangunan Air	(2.791.250,00)	(2.537.500,00)
3	Instalasi	(157.378.370,55)	(145.620.313,73)
4	Jaringan	-	(4.133.333,39)
	Jumlah	**(160.169.620,55)**	**(152.291.147,12)**

5.2.1.2.6.3.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air — Rp2.791.250,00

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air sebesar Rp2.791.250,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.537.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp253.750,00 atau 10,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Waduk Irigasi	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Sawah Irigasi	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Air Irigasi Lainnya	(2.791.250,00)	(2.537.500,00)
	Jumlah	**(2.791.250,00)**	**(2.537.500,00)**

5.2.1.2.6.3.2 Akumulasi Penyusutan Instalasi — Rp157.378.370,55

Akumulasi Penyusutan Instalasi sebesar Rp157.378.370,55 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp145.620.313,73 mengalami kenaikan sebesar Rp11.758.056,82 atau 8,07% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(148.335.666,97)	(145.620.313,73)
6	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	(6.347.737,82)	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
7	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Lainnya	-	-
8	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan di Darat	(2.694.965,76)	-
9	Akumulasi Penyusutan Instalasi Lain-Instalasi Lain	-	-
	Jumlah	**(157.378.370,55)**	**(145.620.313,73)**

5.2.1.2.6.3.3 Akumulasi Penyusutan Jaringan — Rp,00

Akumulasi Penyusutan Jaringan sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.133.333,39 mengalami **penurunan** sebesar Rp4.133.333,39 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa	-	-
2	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon di atas Tanah	-	(4.133.333,39)
4	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas-Jaringan Gas Lainnya	-	-
	Jumlah	-	**(4.133.333,39)**

5.2.1.3 Aset Lainnya — Rp70.491.106,87

Aset Lainnya sebesar Rp70.491.106,87 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp252.673.606,87 mengalami penurunan sebesar Rp182.182.500,00 atau 72,10 % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	-	-
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
3	Aset Tak Berwujud	809.745.000,00	926.045.000,00
4	Aset Lain-lain	1.600.365.726,00	1.616.910.726,00
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(779.865.000,00)	(717.182.500,00)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.559.754.619,13)	(1.573.099.619,13)
	Jumlah	**70.491.106,87**	**252.673.606,87**

5.2.1.3.1 Aset Tak Berwujud — Rp809.745.000,00

Aset Tak Berwujud sebesar Rp809.745.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp926.045.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp116.300.000,00 atau 12,56 % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Goodwill	-	-
2	Lisensi dan Franchise	-	-
3	Hak Cipta	-	-
4	Hak Paten	-	-
5	Software	809.745.000,00	926.045.000,00
6	Kajian	-	-
7	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-
8	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
9	Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-
	Jumlah	**809.745.000,00**	**926.045.000,00**

5.2.1.3.1.1 Aset Tidak Berwujud-Software — Rp809.745.000,00

Aset Tidak Berwujud-Software sebesar Rp809.745.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp926.045.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp116.300.000,00 atau 12,56 % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Aset Tidak Berwujud-Software	809.745.000,00	926.045.000,00
	Jumlah	**809.745.000,00**	**926.045.000,00**

5.2.1.3.2 Aset Lain-Lain — Rp1.600.365.726,00

Aset Lain-Lain sebesar Rp1.600.365.726,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 1.616.910.726,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp16.545.000,00 atau 1,02 % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	1.600.365.726,00	1.616.910.726,00
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
3	Aset Tetap Lain-Lain		
	Jumlah	**1.600.365.726,00**	**1.616.910.726,00**

5.2.1.3.2.1 Aset Rusak Berat/Usang — Rp1.600.365.726,00

Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp1.600.365.726,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.616.910.726,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp16.545.000,00 atau 1,02 % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	1.600.365.726,00	1.616.910.726,00
	Jumlah	**1.600.365.726,00**	**1.616.910.726,00**

5.2.1.3.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud **Rp779.865.000,00**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp779.865.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp717.182.500,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp62.682.500,00 atau 8,74% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	-	-
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(779.865.000,00)	(717.182.500,00)
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	-	-
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Aset Tak Berwujud Lainnya		
	Jumlah	**(779.865.000,00)**	**(717.182.500,00)**

5.2.1.3.3.1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software **Rp779.865.000,00**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software sebesar Rp779.865.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp717.182.500,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp62.682.500,00 atau 8,74% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	(779.865.000,00)	(717.182.500,00)
	Jumlah	**(779.865.000,00)**	**(717.182.500,00)**

5.2.1.3.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya **Rp1.559.754.619,13**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp1.559.754.619,13 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.573.099.619,13 mengalami **penurunan** sebesar Rp13.345.000,00 atau 0,85% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	13.345.000,00	-
2	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai		

6	Akumulasi Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(1.573.099.619,13)	(1.573.099.619,13)
	Jumlah	**(1.559.754.619,13)**	**(1.573.099.619,13)**

5.2.1.3.4.1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa Rp13.345.000,00

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar Rp13.345.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp13.345.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	13.345.000,00	-
	Jumlah	**13.345.000,00**	**-**

5.2.1.3.4.2 Akumulasi Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah Rp1.573.099.619,13

Akumulasi Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp1.573.099.619,13 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.573.099.619,13 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(1.573.099.619,13)	(1.573.099.619,13)
	Jumlah	**(1.573.099.619,13)**	**(1.573.099.619,13)**

5.2.2 KEWAJIBAN Rp585.896.738,38

Kewajiban sebesar Rp585.896.738,38 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.842.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp559.054.738,38 atau 2082,76 % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	585.896.738,38	26.842.000,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	Jumlah	**585.896.738,38**	**26.842.000,00**

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp585.896.738,38

Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp585.896.738,38 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.842.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp559.054.738,38 atau 2082,76% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
2	Utang Bunga	-	-
3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
5	Pendapatan Diterima Dimuka	585.896.738,38	26.842.000,00
6	Utang Belanja	-	-
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
	Jumlah	**585.896.738,38**	**26.842.000,00**

5.2.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya — Rp585.896.738,38

Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya sebesar Rp585.896.738,38 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.842.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp559.054.738,38 atau 2082,76% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	-	-
2	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	585.896.738,38	26.842.000,00
3	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	-	-
	Jumlah	**585.896.738,38**	**26.842.000,00**

5.2.2.1.1.1 Uang Muka Penjualan Daerah dari Pihak Ketiga — Rp585.896.738,38

Uang Mula Penjualan Daerah dari Pihak Ketiga sebesar Rp585.896.738,38 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.842.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp559.054.738,38 atau 2082,76% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	585.896.738,38	26.842.000,00
	Jumlah	**585.896.738,38**	**26.842.000,00**

5.2.3 EKUITAS — Rp133.808.538.896,27

Ekuitas sebesar Rp133.808.538.896,27 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp136.854.116.118,17 mengalami **penurunan** sebesar Rp3.045.577.221,90 atau 2,23% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Ekuitas	255.159.427.799,27	210.765.897.702,17
2	Ekuitas SAL	-	-
3	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	(121.350.888.903,00)	(73.911.781.584,00)
	Jumlah	**133.808.538.896,27**	**136.854.116.118,17**

5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Dari LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan	88.168.444.696,62	122.183.017.059,73	(34.014.572.363,11)	(27,84)
2	Beban	45.549.121.524,60	52.710.794.403,96	(7.161.672.879,36)	(13,59)
	Surplus/(Defisit) Operasional	**42.619.323.172,02**	**69.472.222.655,77**	**(26.852.899.483,75)**	**(38,65)**
3	Kegiatan Non Operasional	320.000,00	(2.022.819.135,76)	2.023.139.135,76	(100,02)
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	**42.619.643.172,02**	**67.449.403.520,01**	**(24.829.760.347,99)**	**(36,81)**
4	Pos Luar Biasa	-	-	-	-
	Jumlah	**42.619.643.172,02**	**67.449.403.520,01**	**(24.829.760.347,99)**	**(36,81)**

Penjelasan lebih lanjut mengenai Laporan Operasional Tahun 2021 sebagai berikut:

5.3.1 PENDAPATAN DAERAH-LO — Rp88.168.444.696,62

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp88.168.444.696,62 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp122.183.017.059,73 mengalami **penurunan** sebesar Rp 34.014.572.363,11 atau 27,84% dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	88.727.499.435,00	26.842.000,00	585.896.738,38	88.168.444.696,62	121.172.217.059,73	(33.003.772.363,11)	(27,24)
2	Pendapatan Transfer - LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO	-	-	-	-	1.010.800.000,00	(1.010.800.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**88.727.499.435,00**	**26.842.000,00**	**585.896.738,38**	**88.168.444.696,62**	**122.183.017.059,73**	**(34.014.572.363,11)**	**(27,84)**

Total Pendapatan-LRA			**Rp**	**88.727.499.435,00**
Penambahan				
Saldo Akhir Piutang	Rp	-		
Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka	Rp	26.842.000,00		
Penambahan Pendapatan	Rp	-		
Total Penambahan			**Rp**	**26.842.000,00**
Pengurangan				
Saldo Awal Piutang	Rp	-		
Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka	Rp	585.896.738,38		
Saldo Koreksi Piutang	Rp	-		
Lebih Salur Transfer Dana Perimbangan	Rp	-		
BOS Kepada Sekolah milik Kab/Kota	Rp	-		
Pengurangan Pendapatan	Rp	-		
Total Penngurangan			**Rp**	**585.896.738,38**
Total Pendapatan LO			**Rp**	**88.168.444.696,62**

5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO Rp88.168.444.696,62

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO terealisasi sebesar Rp88.168.444.696,62 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp121.172.217.059,73 mengalami **penurunan** sebesar Rp 33.003.772.363,11 atau 27,24% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.903.488.640,00	26.842.000,00	585.896.738,38	1.344.433.901,62	2.488.695.278,00	(1.144.261.376,38)	(45,98)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO	-	-	-	-	-	-	-
4	Lain-Lain PAD yang Sah - LO	86.824.010.795,00	-	-	86.824.010.795,00	118.683.521.781,73	(31.859.510.986,73)	(26,84)
	Jumlah	**88.727.499.435,00**	**26.842.000,00**	**585.896.738,38**	**88.168.444.696,62**	**121.172.217.059,73**	**(33.003.772.363,11)**	**(27,24)**

Total Pendapatan-LRA			**Rp**	**88.727.499.435,00**
Penambahan				
Saldo Akhir Piutang	Rp	-		
Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka	Rp	26.842.000,00		
Koreksi karena perbedaan metode perhitungan	Rp	-		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-		
Total Penambahan			**Rp**	**26.842.000,00**
Pengurangan				
Saldo Awal Piutang	Rp	-		
Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka	Rp	585.896.738,38		
Koreksi Kurang Piutang	Rp	-		
Koreksi Kas	Rp	-		

Total Penngurangan	**Rp**	**585.896.738,38**
Total Pendapatan LO	**Rp**	**88.168.444.696,62**

5.3.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah-LO — Rp1.344.433.901,62

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terealisasi sebesar Rp1.344.433.901,62 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.488.695.278,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.144.261.376,38 atau 45,98% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Jasa Umum - LO	-	-	-	-	-	-	-
2	Retribusi Jasa Usaha - LO	1.903.488.640,00	26.842.000,00	585.896.738,38	1.344.433.901,62	2.488.695.278,00	(1.144.261.376,38)	(45,98)
3	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1.903.488.640,00**	**26.842.000,00**	**585.896.738,38**	**1.344.433.901,62**	**2.488.695.278,00**	**(1.144.261.376,38)**	**(45,98)**

Total Pendapatan-LRA			**Rp**	**1.903.488.640,00**
Penambahan				
Saldo Akhir Piutang	Rp	26.842.000,00		
Total Penambahan			**Rp**	**26.842.000,00**
Pengurangan				
Saldo Awal Piutang	Rp	-		
Saldo Akhir Pendapatan diterima dimuka	Rp	585.896.738,38		
Total Penngurangan			**Rp**	**585.896.738,38**
Total Pendapatan LO			**Rp**	**1.344.433.901,62**

5.3.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO — Rp1.344.433.901,62

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp1.344.433.901,62 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.488.695.278,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp1.144.261.376,38 atau 45,98% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.903.488.640,00	26.842.000,00	585.896.738,38	1.344.433.901,62	1.808.585.278,00	(464.151.376,38)	(25,66)
2	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Retribusi Terminal-	-	-	-	-	-	-	-

	LO							
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO	-	-	-	-	680.110.000,00	(680.110.000,00)	(100,00)
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan-LO	-	-	-	-	-	-	-
6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1.903.488.640,00**	**26.842.000,00**	**585.896.738,38**	**1.344.433.901,62**	**2.488.695.278,00**	**(1.144.261.376,38)**	**(45,98)**

5.3.1.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO Rp1.344.433.901,62

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp1.344.433.901,62 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.488.695.278,00 **penurunan** sebesar Rp1.144.261.376,38 atau 45,98% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	1.903.488.640,00	26.842.000,00	585.896.738,38	1.344.433.901,62	1.447.026.733,00	(102.592.831,38)	(7,09)
2	Retribusi Penyewaan Tanah-LO				-	-	-	-
3	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO				-	-	-	-
4	Retribusi Pemakaian Laboratorium-LO				-	-	-	-
5	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO				-	361.558.545,00	(361.558.545,00)	(100,00)
6	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO				-	-	-	-
7	Retribusi Pemakaian Alat-LO				-	-	-	-
	Jumlah	**1.903.488.640,00**	**26.842.000,00**	**585.896.738,38**	**1.344.433.901,62**	**1.808.585.278,00**	**(464.151.376,38)**	**(25,66)**

5.3.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO **Rp86.824.010.795,00**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp86.824.010.795,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp118.683.521.781,73 mengalami **penurunan** sebesar Rp31.859.510.986,73 atau 26,84 % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	914.674.250,00	-	-	914.674.250,00	614.477.520,00	300.196.730,00	48,85
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO						-	-
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO						-	-
4	Hasil Kerja Sama Daerah - LO						-	-
5	Jasa Giro - LO	33.421.665.370,00	-	-	33.421.665.370,00	43.049.831.808,00	(9.628.166.438,00)	(22,37)
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO	-	-	-	-	-	-	-
7	Pendapatan Bunga - LO	52.487.671.175,00	-	-	52.487.671.175,00	75.019.212.453,73	(22.531.541.278,73)	(30,03)
8	Pendapatan Lain-Lain SKPKD - LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**86.824.010.795,00**	-	-	**86.824.010.795,00**	**118.683.521.781,73**	**(31.859.510.986,73)**	**(26,84)**

5.3.1.1.2.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO **Rp914.674.250,00**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp914.674.250,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp614.477.520,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp300.196.730,00 atau 48,85% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Hasil Penjualan Tanah-LO	-			-	-	-	-
2	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	130.149.400,00			130.149.400,00	238.835.520,00	(108.686.120,00)	(45,51)
3	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	-			-	-	-	-

4	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-LO	-			-	-	-	-
5	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	651.644.250,00			651.644.250,00	375.642.000,00	276.002.250,00	73,47
6	Hasil Penjualan Aset Lainnya-LO	132.880.600,00			132.880.600,00	-	132.880.600,00	-
	Jumlah	**914.674.250,00**	**-**	**-**	**914.674.250,00**	**614.477.520,00**	**300.196.730,00**	**48,85**

5.3.1.1.2.2 Jasa Giro-LO — Rp33.421.665.370,00

Jasa Giro terealisasi sebesar Rp33.421.665.370,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp43.049.831.808,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp9.628.166.438,00 atau 22,37% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	33.421.665.370,00			33.421.665.370,00	43.049.831.808,00	(9.628.166.438,00)	(22,37)
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO				-	-	-	-
3	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan-LO				-	-	-	-
4	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO				-	-	-	-
5	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO				-	-	-	-
	Jumlah	**33.421.665.370,00**	**-**	**-**	**33.421.665.370,00**	**43.049.831.808,00**	**(9.628.166.438,00)**	**(22,37)**

5.3.1.1.2.3 Pendapatan Bunga-LO — Rp52.487.671.175,00

Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp52.487.671.175,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp, 75.019.212.453,73 mengalami **penurunan** sebesar Rp22.531.541.278,73 atau 30,03 % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	52.487.671.175,00			52.487.671.175,00	75.019.212.453,73	(22.531.541.278,73)	(30,03)
	Jumlah	**52.487.671.175,00**	**-**	**-**	**52.487.671.175,00**	**75.019.212.453,73**	**(22.531.541.278,73)**	**(30,03)**

5.3.2 BEBAN DAERAH — Rp45.549.121.524,60

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp45.549.121.524,60 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp52.710.794.403,96 mengalami **penurunan** sebesar Rp7.161.672.879,36 atau 13,59% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Operasional	40.506.080.059,00	435.028.925,08	143.947.043,58	40.797.161.940,50	47.426.342.858,24	(6.629.180.917,74)	(13,98)
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	4.751.959.584,10	-	4.751.959.584,10	5.284.451.545,72	(532.491.961,62)	(10,08)
3	Beban Transfer	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**40.506.080.059,00**	**5.186.988.509,18**	**143.947.043,58**	**45.549.121.524,60**	**52.710.794.403,96**	**(7.161.672.879,36)**	**(13,59)**

Total Belanja Daerah			Rp	**40.506.080.059,00**
Penambahan				
Saldo Awal Persediaan	Rp	85.376.500,00		
Beban Asuransi BMD	Rp	185.356.625,08		
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	46.970.000,00		
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	Rp	16.020.800,00		
Beban Lain-Lain (aset ekstrakomtabel)	Rp	101.305.000,00		
Beban Penyusutan & Amortisasi	Rp	4.751.959.584,10		
Total Penambahan			Rp	**5.186.988.509,18**
Pengurangan				
Saldo Akhir Persediaan	Rp	52.341.900,00		
Beban Asuransi BMD Dibayar Dimuka	Rp	91.605.143,58		
Total Pengurangan			Rp	**143.947.043,58**
Total Beban Daerah			Rp	**45.549.121.524,60**

5.3.2.1 BEBAN OPERASIONAL — Rp40.797.161.940,50

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp40.797.161.940,50 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp47.426.342.858,24 mengalami **penurunan** sebesar Rp6.629.180.917,74 atau 13,98% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pegawai	17.801.536.467,00	-	-	17.801.536.467,00	31.095.020.825,00	(13.293.484.358,00)	(42,75)
2	Beban Barang dan Jasa	22.704.543.592,00	317.703.125,08	143.947.043,58	22.878.299.673,50	16.331.322.033,24	6.546.977.640,26	40,09
3	Beban Bunga	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Subsidi	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Hibah	-	-	-	-	-	-	-

6	Beban Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Penyisihan Piutang		16.020.800,00	-	16.020.800,00	-	16.020.800,00	-
8	Beban Lain-Lain	-	101.305.000,00	-	101.305.000,00	-	101.305.000,00	-
	Jumlah	**40.506.080.059,00**	**435.028.925,08**	**143.947.043,58**	**40.797.161.940,50**	**47.426.342.858,24**	**(6.629.180.917,74)**	**(13,98)**

Total Belanja Daerah			**Rp**	**40.506.080.059,00**
Penambahan				
Saldo Awal Persediaan	Rp	85.376.500,00		
Beban Asuransi BMD	Rp	185.356.625,08		
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	46.970.000,00		
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	Rp	16.020.800,00		
Beban Lain-Lain (aset ekstrakomtabel)	Rp	101.305.000,00		
Total Penambahan			**Rp**	**435.028.925,08**
Pengurangan				
Saldo Akhir Persediaan	Rp	52.341.900,00		
Beban Asuransi BMD Dibayar Dimuka	Rp	91.605.143,58		
Total Pengurangan			**Rp**	**143.947.043,58**
Total Beban Daerah			**Rp**	**40.797.161.940,50**

5.3.2.1.1 Beban Pegawai Rp17.801.536.467,00

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp17.801.536.467,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp31.095.020.825,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.293.484.358,00 atau 42,75% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	8.851.536.467,00	-	-	8.851.536.467,00	9.231.803.106,00	(380.266.639,00)	(4,12)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	8.950.000.000,00	-	-	8.950.000.000,00	9.536.648.347,00	(586.648.347,00)	(6,15)
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-	12.326.569.372,00	(12.326.569.372,00)	(100,00)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	-
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	-	-	-	-	-	-	-

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
7	Beban Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**17.801.536.467,00**	**-**	**-**	**17.801.536.467,00**	**31.095.020.825,00**	**(13.293.484.358,00)**	**(42,75)**

5.3.2.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN — Rp8.851.536.467,00

Beban Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp8.851.536.467,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.231.803.106,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp380.266.639,00 atau 4,12% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Gaji Pokok ASN	6.931.447.992,00			6.931.447.992,00	7.006.222.900,00	(74.774.908,00)	(1,07)
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	512.019.484,00			512.019.484,00	605.854.906,00	(93.835.422,00)	(15,49)
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	210.450.000,00			210.450.000,00	242.250.000,00	(31.800.000,00)	(13,13)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	81.180.000,00			81.180.000,00	60.240.000,00	20.940.000,00	34,76
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	225.755.000,00			225.755.000,00	293.880.000,00	(68.125.000,00)	(23,18)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	309.160.980,00			309.160.980,00	321.255.120,00	(12.094.140,00)	(3,76)
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.791.412,00			21.791.412,00	22.612.401,00	(820.989,00)	(3,63)
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	74.130,00			74.130,00	97.004,00	(22.874,00)	(23,58)
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	514.406.175,00			514.406.175,00	621.804.031,00	(107.397.856,00)	(17,27)
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	11.312.823,00			11.312.823,00	57.586.744,00	(46.273.921,00)	(80,36)
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	33.938.471,00			33.938.471,00		33.938.471,00	-
	Jumlah	**8.851.536.467,00**	**-**	**-**	**8.851.536.467,00**	**9.231.803.106,00**	**(380.266.639,00)**	**(4,12)**

5.3.2.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN — Rp8.950.000.000,00

Beban Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp8.950.000.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.536.648.347,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp586.648.347,00 atau 6,15% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.950.000.000,00			8.950.000.000,00	9.536.648.347,00	(586.648.347,00)	(6,15)
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN				-	-	-	-
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN				-	-	-	-
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN				-	-	-	-
5	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN				-	-	-	-
								-
	Jumlah	8.950.000.000,00	-	-	8.950.000.000,00	9.536.648.347,00	(586.648.347,00)	(6,15)

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa — Rp22.878.299.673,50

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp22.878.299.673,50 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.331.322.033,24 mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.546.977.640,26 atau 40,09% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang	4.792.990.962,00	85.376.500,00	52.341.900,00	4.826.025.562,00	3.325.305.715,00	1.500.719.847,00	45,13
2	Beban Jasa	13.169.924.593,00	185.356.625,08	91.605.143,58	13.263.676.074,50	6.188.640.224,24	7.075.035.850,26	114,32
3	Beban Pemeliharaan	833.663.757,00	46.970.000,00	-	880.633.757,00	2.950.694.841,00	(2.070.061.084,00)	(70,16)
4	Beban Perjalanan Dinas	3.907.964.280,00	-	-	3.907.964.280,00	3.866.681.253,00	41.283.027,00	1,07
5	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-

6	Beban Barang dan Jasa BOP	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Barang dan Jasa BOS	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**22.704.543.592,00**	**317.703.125,08**	**143.947.043,58**	**22.878.299.673,50**	**16.331.322.033,24**	**6.546.977.640,26**	**40,09**

Total Belanja Barang & Jasa			**Rp**	**22.704.543.592,00**
Penambahan				
Saldo Awal Persediaan	Rp	85.376.500,00		
Beban Asuransi BMD	Rp	185.356.625,08		
Beban Pemeliharaan Gedung & Bangunan	Rp	46.970.000,00		
Total Penambahan			**Rp**	**317.703.125,08**
Pengurangan				
Saldo Akhir Persediaan	Rp	52.341.900,00		
Beban Asuransi BMD Dibayar Dimuka	Rp	91.605.143,58		
Total Pengurangan			**Rp**	**143.947.043,58**
Total Beban Barang & Jasa			**Rp**	**22.878.299.673,50**

5.3.2.1.2.1 Beban Barang — Rp4.826.025.562,00

Beban Barang terealisasi sebesar Rp4.826.025.562,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.325.305.715,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.500.719.847,00 atau 45,13% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang Pakai Habis	4.792.990.962,00	85.376.500,00	52.341.900,00	4.826.025.562,00	3.325.305.715,00	1.500.719.847,00	45,13
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	-			-	-	-	-
3	Beban Barang Bekas Dipakai	-			-	-	-	-
	Jumlah	**4.792.990.962,00**	**85.376.500,00**	**52.341.900,00**	**4.826.025.562,00**	**3.325.305.715,00**	**1.500.719.847,00**	**45,13**

Total Belanja Barang			**Rp**	**4.792.990.962,00**
Penambahan				
Saldo Awal Persediaan	Rp	85.376.500,00		
Total Penambahan			**Rp**	**85.376.500,00**
Pengurangan				
Saldo Akhir Persediaan	Rp	52.341.900,00		
Total Pengurangan			**Rp**	**52.341.900,00**
Total Beban Barang			**Rp**	**4.826.025.562,00**

5.3.2.1.2.2 Beban Jasa — Rp13.263.676.074,50

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp13.263.676.074,50 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.188.640.224,24 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.075.035.850,26 atau 114,32% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Jasa Kantor	11.705.489.192,00			11.705.489.192,00	4.986.868.695,00	6.718.620.497,00	134,73
2	Beban Jasa Asuransi	152.698.401,00	185.356.625,08	91.605.143,58	246.449.882,50	261.775.529,24	(15.325.646,74)	(5,85)
3	Beban Sewa Tanah				-	-	-	-
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	52.800.000,00			52.800.000,00	142.190.000,00	(89.390.000,00)	(62,87)
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan				-	-	-	-
6	Beban Sewa Jalan Irigasi dan Jaringan				-	-	-	-
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya				-	37.464.000,00	(37.464.000,00)	(100,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	34.720.000,00			34.720.000,00	70.767.000,00	(36.047.000,00)	(50,94)
9	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.224.217.000,00			1.224.217.000,00	689.575.000,00	534.642.000,00	77,53
10	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)				-	-	-	-
11	Beban Beasiswa Pendidikan PNS				-	-	-	-
12	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK				-	-	-	-
13	Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN				-	-	-	-
14	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi				-	-	-	-
	Jumlah	**13.169.924.593,00**	**185.356.625,08**	**91.605.143,58**	**13.263.676.074,50**	**6.188.640.224,24**	**7.075.035.850,26**	**114,32**

Total Belanja Jasa		Rp	**13.169.924.593,00**
Penambahan			
Beban Asuransi BMD	Rp	185.356.625,08	

Total Penambahan				**Rp**	**185.356.625,08**
Pengurangan					
Beban Asuransi BMD Dibayar Dimuka	Rp	91.605.143,58			
Total Pengurangan				**Rp**	**91.605.143,58**
Total Beban Jasa				**Rp**	**13.263.676.074,50**

5.3.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan — Rp880.633.757,00

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp880.633.757,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.950.694.841,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.070.061.084,00 atau 70,16% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pemeliharaan Tanah	-			-	-	-	-
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	447.383.059,00			447.383.059,00	848.257.255,00	(400.874.196,00)	(47,26)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	386.280.698,00	46.970.000,00		433.250.698,00	1.805.085.916,00	(1.371.835.218,00)	(76,00)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-			-	297.351.670,00	(297.351.670,00)	(100,00)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-			-	-	-	-
	Jumlah	**833.663.757,00**	**46.970.000,00**	**-**	**880.633.757,00**	**2.950.694.841,00**	**(2.070.061.084,00)**	**(70,16)**

5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas — Rp3.907.964.280,00

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp3.907.964.280,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.866.681.253,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp41.283.027,00 atau 1,07% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2021 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	3.907.964.280,00			3.907.964.280,00	3.866.681.253,00	41.283.027,00	1,07
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri				-	-	-	-
	Jumlah	**3.907.964.280,00**	**-**	**-**	**3.907.964.280,00**	**3.866.681.253,00**	**41.283.027,00**	**1,07**

5.3.2.1.3 Beban Penyisihan Piutang — Rp16.020.800,00

Beban Penyisihan Piutang terealisasi sebesar Rp16.020.800,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp16.020.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	-	-	-
2	Beban Penyishan Piutang Retribusi Daerah	16.020.800,00	-	16.020.800,00	-
3	Beban Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Kekyaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
4	Beban Penyishan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-
5	Beban Penyishan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-
6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-	-
7	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	**16.020.800,00**	-	**16.020.800,00**	-

5.3.2.1.4 Beban Lain-Lain — Rp101.305.000,00

Beban Lain-Lain terealisasi sebesar Rp101.305.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp101.305.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Lain-Lain	101.305.000,00	-	101.305.000,00	-
	Jumlah	**101.305.000,00**	-	**101.305.000,00**	-

5.3.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI — Rp4.751.959.584,10

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp4.751.959.584,10 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.284.451.545,72 mengalami **penurunan** sebesar Rp**532.491.961,62** atau 10,08% dengan rincian sebagai berikut:

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Peralatan dan Mesin	2.706.363.515,83	3.356.991.115,09	(650.627.599,26)	(19,38)
2	Beban Gedung dan Bangunan	1.854.601.761,45	1.736.052.790,41	118.548.971,04	6,83
3	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.011.806,82	12.425.140,22	(413.333,40)	(3,33)
4	Beban Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-

5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	178.982.500,00	178.982.500,00	-	-
6	Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	**4.751.959.584,10**	**5.284.451.545,72**	**(532.491.961,62)**	**(10,08)**

5.3.2.2.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin Rp2.706.363.515,83

Beban Penyusutan dan Amortisasi Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp2.706.363.515,83 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.356.991.115,09 mengalami **penurunan** sebesar Rp650.627.599,26 atau 19,38% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Alat Besar	247.519.125,01	256.021.624,99	(8.502.499,98)	(3,32)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	589.139.135,00	765.647.322,50	(176.508.187,50)	(23,05)
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	-	-
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-	-
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	779.433.560,01	1.162.600.711,60	(383.167.151,59)	(32,96)
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	127.782.800,00	162.827.456,00	(35.044.656,00)	(21,52)
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	-
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-	-
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	-	-	-	-
10	Beban Penyusutan Komputer	962.488.895,81	1.009.894.000,00	(47.405.104,19)	(4,69)
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	-	-	-	-
12	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	-	-	-	-
13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	-
14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-
15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-	-	-	-
16	Beban Penyusutan Alat Peraga	-	-	-	-
17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	-	-	-	-
18	Beban Penyusutan Rambu-rambu	-	-	-	-
19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	-	-	-	-
	Jumlah	**2.706.363.515,83**	**3.356.991.115,09**	**(650.627.599,26)**	**(19,38)**

5.3.2.2.1.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Besar Rp247.519.125,01

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Besar terealisasi sebesar Rp247.519.125,01 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp256.021.624,99 mengalami **penurunan** sebesar Rp8.502.499,98 atau 3,32% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	-	256.021.624,99	(256.021.624,99)	(100,00)
2	Beban Penyusutan Alat Besar Apung	-	-	-	-
3	Beban Penyusutan Alat Bantu	247.519.125,01	-	247.519.125,01	-
	Jumlah	**247.519.125,01**	**256.021.624,99**	**(8.502.499,98)**	**(3,32)**

5.3.2.2.1.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Angkutan Rp589.139.135,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Angkutan terealisasi sebesar Rp589.139.135,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp765.647.322,50 mengalami **penurunan** sebesar Rp176.508.187,50 atau 23,05% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	589.139.135,00	765.647.322,50	(176.508.187,50)	(23,05)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-	-
3	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor	-	-	-	-
4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	-	-	-	-
5	Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara	-	-	-	-
	Jumlah	**589.139.135,00**	**765.647.322,50**	**(176.508.187,50)**	**(23,05)**

5.3.2.2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp779.433.560,01

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Kantor dan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp779.433.560,01 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.162.600.711,60 mengalami **penurunan** sebesar Rp383.167.151,59 atau 32,96% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Alat Kantor	40.419.000,00	1.162.600.711,60	(1.122.181.711,60)	(96,52)
2	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	681.431.692,01	-	681.431.692,01	-
3	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	57.582.868,00	-	57.582.868,00	-
	Jumlah	**779.433.560,01**	**1.162.600.711,60**	**(383.167.151,59)**	**(32,96)**

5.3.2.2.1.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp127.782.800,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terealisasi sebesar Rp127.782.800,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp162.827.456,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp35.044.656,00 atau 21,52% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Alat Studio	123.681.300,00	162.827.456,00	(39.146.156,00)	(24,04)
2	Beban Penyusutan Alat Komunikasi		-	-	-
3	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	4.101.500,00	-	4.101.500,00	-
4	Beban Navigasi		-	-	-
	Jumlah	**127.782.800,00**	**162.827.456,00**	**(35.044.656,00)**	**(21,52)**

5.3.2.2.1.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi Komputer Rp962.488.895,81

Beban Penyusutan dan Amortisasi Komputer terealisasi sebesar Rp962.488.895,81 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.009.894.000,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp, 47.405.104,19 atau 4,69% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Komputer Unit	384.101.729,16	1.009.894.000,00	(625.792.270,84)	(61,97)
2	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	578.387.166,65	-	578.387.166,65	-
	Jumlah	**962.488.895,81**	**1.009.894.000,00**	**(47.405.104,19)**	**(4,69)**

5.3.2.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan Rp1.854.601.761,45

Beban Penyusutan dan Amortisasi Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp1.854.601.761,45 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp**1.736.052.790,41** mengalami **kenaikan** sebesar Rp118.548.971,04 atau 6,83% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	1.528.509.237,77	1.413.353.766,73	115.155.471,04	8,15
2	Beban Penyusutan Monumen	16.938.700,00	16.938.700,00	-	-
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	-	-	-	-
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	309.153.823,68	305.760.323,68	3.393.500,00	1,11
	Jumlah	**1.854.601.761,45**	**1.736.052.790,41**	**118.548.971,04**	**6,83**

5.3.2.2.2.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Bangunan Gedung Rp1.528.509.237,77

Beban Penyusutan dan Amortisasi Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp1.528.509.237,77 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.413.353.766,73 mengalami **kenaikan** sebesar Rp115.155.471,04 atau 8,15 % dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	483.504.484,30	1.413.353.766,73	(929.849.282,43)	(65,79)
2	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	1.045.004.753,47	-	1.045.004.753,47	-
	Jumlah	**1.528.509.237,77**	**1.413.353.766,73**	**115.155.471,04**	**8,15**

5.3.2.2.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi Monumen Rp16.938.700,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Monumen terealisasi sebesar Rp16.938.700,00 jumlahnya sama apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.938.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	16.938.700,00	16.938.700,00	-	-
	Jumlah	**16.938.700,00**	**16.938.700,00**	**-**	**-**

5.3.2.2.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp309.153.823,68

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tugu Titik Kontrol/Pasti terealisasi sebesar Rp309.153.823,68 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp305.760.323,68 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.393.500,00 atau 1,11% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	309.153.823,68	305.760.323,68		1,11
	Jumlah	**309.153.823,68**	**305.760.323,68**	**3.393.500,00**	**1,11**

5.3.2.2.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp12.011.806,82

Beban Penyusutan dan Amortisasi Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp12.011.806,82 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.425.140,22 mengalami **penurunan** sebesar Rp413.333,40 atau 3,33% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
2	Bangunan Air	-	253.750,00	(253.750,00)	(100,00)
3	Instalasi	12.011.806,82	11.758.056,83	253.749,99	2,16
4	Jaringan	-	413.333,39	(413.333,39)	(100,00)
	Jumlah	**12.011.806,82**	**12.425.140,22**	**(413.333,40)**	**(3,33)**

5.3.2.2.3.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi Instalasi — Rp12.011.806,82

Beban Penyusutan dan Amortisasi Instalasi terealisasi sebesar Rp12.011.806,82 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.758.056,83 mengalami **kenaikan** sebesar Rp253.749,99 atau 2,16% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	2.969.103,24	11.758.056,83	(8.788.953,59)	(74,75)
2	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor		-	-	-
3	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah		-	-	-
4	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan		-	-	-
5	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik		-	-	-
6	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	6.347.737,82	-	6.347.737,82	-
7	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	2.694.965,76	-	2.694.965,76	-
8	Beban Penyusutan Instalasi Gas		-	-	-
9	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman		-	-	-
10	Beban Penyusutan Instalasi Lain		-	-	-
	Jumlah	**12.011.806,82**	**11.758.056,83**	**253.749,99**	**2,16**

5.3.2.2.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud — Rp178.982.500,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Tak Berwujud terealisasi sebesar Rp178.982.500,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp178.982.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	-	-	-	-
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-	-	-
3	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-	-	-
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	178.982.500,00	178.982.500,00	-	-

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	-	-	-	-
	Jumlah	**178.982.500,00**	**178.982.500,00**	-	-

5.3.2.2.4.1 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software Rp178.982.500,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-software terealisasi sebesar Rp178.982.500,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp178.982.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Hak Software	178.982.500,00	178.982.500,00	-	-
	Jumlah	**178.982.500,00**	**178.982.500,00**	-	-

5.3.3 SURPLUS DEFISIT NON OPERASIONAL

5.3.3.1 DEFISIT NON OPERASIONAL Rp320.000,00

Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp320.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya surplus sebesar Rp2.028.906.122,06 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.029.226.122,06 atau 100,02% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	2.028.906.122,06	(2.028.906.122,06)	(100,00)
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	(320.000,00)	-	(320.000,00)	-
	Jumlah	**(320.000,00)**	**2.028.906.122,06**	**(2.029.226.122,06)**	**(100,02)**

5.3.3.1.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya Rp320.000,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya terealisasi sebesar Rp320.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya surplus sebesar Rp2.022.819.135,76 mengalami **penurunan** sebesar Rp2.035.313.108,36 atau 100,62% dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	(320.000,00)	-	(320.000,00)	-
				-	-
	Jumlah	**(320.000,00)**	-	**(320.000,00)**	-

5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Awal	136.854.116.118,17	140.699.400.158,19	(3.845.284.040,02)	-2,73
2	Surplus/Defisit-LO	42.619.643.172,02	67.449.403.520,01	(24.829.760.347,99)	-36,81
3	RK-PPKD	(47.439.107.319,00)	(73.911.781.584,00)	26.472.674.265,00	-35,82
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	1.773.886.925,08	2.617.094.023,97	(843.207.098,89)	-32,22
	Ekuitas Akhir	**133.808.538.896,27**	**136.854.116.118,17**	**(3.045.577.221,90)**	**-2,23**

5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas awal tahun 2021 sebesar Rp136.854.116.118,17 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2020.

5.4.2 Surplus/Defisit – LO

Surplus/defisit – LO sebesar Rp42.619.643.172,02 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Tahun 2021.

5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp1.773.886.925,08 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreks/Penyesuaian Kas	-	-	-	0,00
2	Koreks/Penyesuaian Piutang	-	1.217.397.260,27	(1.217.397.260,27)	-100,00
3	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Piutang	-	(6.086.986,30)	6.086.986,30	-100,00
4	Koreks/Penyesuaian Persediaan	-	-	-	0,00
5	Koreks/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-	-	0,00
6	Koreks/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-	-	0,00
7	Koreks/Penyesuaian Investasi Permanen	-	-	-	0,00
8	Koreks/Penyesuaian Aset Tetap	3.982.722.140,00	1.302.582.500,00	2.680.139.640,00	205,76
9	Koreks/Penyesuaian Penyusutan	(2.222.180.214,72)	103.201.250,00	(2.325.381.464,72)	-2253,25
10	Koreks/Penyesuaian Aset Lainnya	-	-	-	0,00
11	Koreks/Penyesuaian Amortisasi	-	-	-	0,00

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
12	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	13.345.000,00	-	13.345.000,00	0,00
13	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai	-	-	-	0,00
14	Koreks/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	0,00
15	Koreks/Penyesuaian Lain-Lain	(0,20)	-	(0,20)	0,00
	Jumlah	**1.773.886.925,08**	**2.617.094.023,97**	**- 843.207.098,89**	**-32,22**

5.4.3.1 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar Rp3.982.722.140,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
2	Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	5.854.357.500,00	1.839.388.000,00	4.014.969.500,00	218,28
3	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-	-	-
4	Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi dari Aset Lainnya	-	-	-	-
5	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penilaian Aset Tetap	-	-	-	-
6	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	-	-	-	-
7	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap	-	-	-	-
8	Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	-	-	-	-
9	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
10	Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	(1.871.635.360,00)	(536.805.500,00)	- 1.334.829.860,00	248,66
11	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penilaian Aset Tetap	-	-	-	-
	Jumlah	**3.982.722.140,00**	**1.302.582.500,00**	**2.680.139.640,00**	**205,76**

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap ini antara lain disebabkan oleh adanya koreksi penyesuaian mutasi masuk aset tetap antar SKPD berupa alat angkut sebesar Rp1.087.812.000,00 alat komputer sebesar Rp32.780.000,00, bangunan dan gedung sebesar Rp4.733.765.500,00. Sedangkan koreksi penyesuaian mutasi keluar aset tetap antar SKPD berupa peralatan dan mesin sebesar Rp1.505.421.470,00 gedung dan bangunan sebesar Rp277.004.000,00, jaringan sebesar Rp12.400.000,00 dan bahan perpustakaan sebesar Rp76.809.890,00.

5.4.3.2 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar Rp2.222.180.214,72 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(5.264.463.268,83)	(420.869.250,00)	(4.843.594.018,83)	1150,85
2	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	3.042.283.054,11	524.070.500,00	2.518.212.554,11	480,51
	Jumlah	**(2.222.180.214,72)**	**103.201.250,00**	**(2.325.381.464,72)**	**-2253,25**

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan ini disebabkan oleh koreksi penyesuaian penyusutan mutasi masuk aset tetap antar SKPD sebesar Rp3.879.132.258,11, reklas masuk dari aset tetap sebesar Rp1.371.666.010,72 dan reklas masuk dari aset lainnya sebesar Rp13.665.000,00. Sedangkan koreksi penyesuaian penyusutan mutasi kurang aset tetap antar SKPD sebesar Rp 1.670.937.043,39, reklas keluar ke aset tetap sebesar Rp1.371.666.010,72 dan defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp320.000,00.

5.4.4 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya

Koreksi/Penyesuaian penyusutan aset lainnya sebesar Rp13.345.000,00 disebabkan adanya lebih catat nilai penyusutan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-	-
2	Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan Aset Lainnya	13.345.000,00	-	13.345.000,00	-
	Jumlah	**13.345.000,00**	**-**	**13.345.000,00**	**-**

Koreksi/Penyesuaian penyusutan aset lainnya disebabkan oleh koreksi penyusutan kurang aset lain-lain reklas ke aset tetap sebesar Rp13.345.000,00.

5.4.5 Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain

Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain sebesar Rp0,2 sebagai berikut :

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Tambah Lain-Lain	-0,20	0,00	-0,20	-
2	Koreksi/Penyesuaian Kurang Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	-
	Jumlah	**-0,20**	**0,00**	**-0,20**	**-**

Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain disebabkan oleh koreksi penilaian kembali akumulasi aset tetap sebesar Rp0,2.

5.6.3 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir sebesar Rp133.808.538.896,27 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	2021	2020	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Akhir	133.808.538.896,27	136.854.116.118,17	(3.045.577.221,90)	-2,23
	Jumlah	**133.808.538.896,27**	**136.854.116.118,17**	**(3.045.577.221,90)**	**-2,23**

BAB 6
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 9 November 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 Tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

6.1.1. KEDUDUKAN

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

6.1.2. TUGAS

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

6.1.3. FUNGSI

Fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah;
e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

6.1.4. VISI & MISI

Badan Pengelola Keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah mendukung Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah yaitu :

VISI :

"Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari"

"Mboten Korupsi Mboten Ngapusi"

MISI :

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan.
2. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan, Menanggulangi Kemiskinan dan Pengangguran.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang Bersih, Jujur dan Transparan, " Mboten Korupsi Mboten Ngapusi ".
4. Memperkuat Kelembagaan Sosial Masyarakat untuk Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan.
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan dan Proses Pembangunan yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak.
6. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik untuk Memenuhi Kebutuhan Dasar Masyarakat.
7. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan Jawa Tengah yang Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

6.2 STRUKTUR ORGANISASI

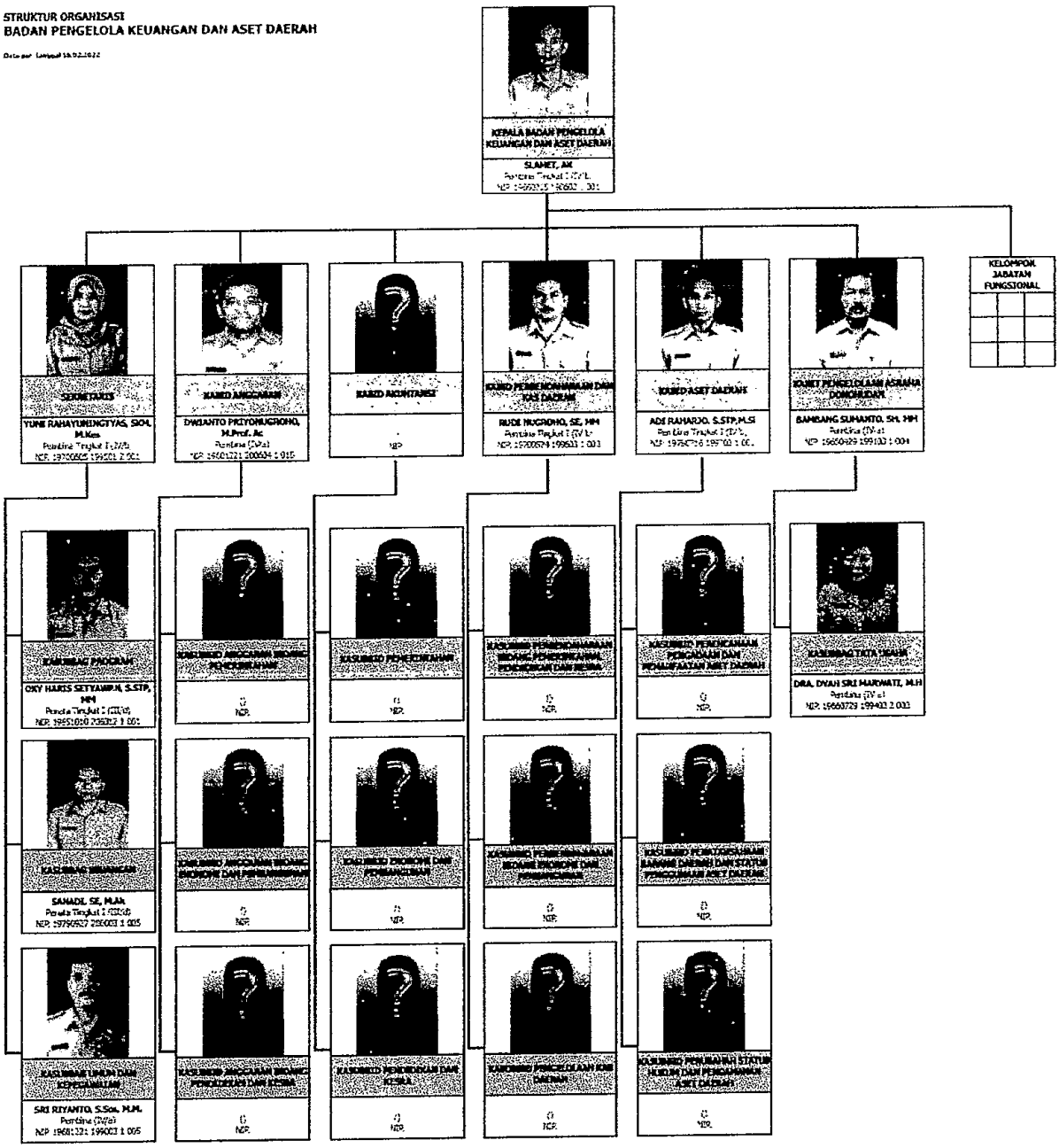

BAB 7
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan APBD Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 dan posisi keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya informasi dalam Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah

Semarang, 14 Februari 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

SLAMET, AK
Pembina Tingkat I
NIP. 19660215 198603 1 001